



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI DENGAN  
MENTERI PERTANIAN RI**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 4 Mei 2020
Waktu	: 13.30 s.d. 17.15 WIB
Tempat	: Kantor/rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat Acara	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) : Membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 46 dari 55 orang Anggota Komisi IV dengan rincian:

**1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)**

9 dari 12 orang Anggota

1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
3. Ir. Effendi Sianipar
4. H. Yadi Srimulyadi
5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
6. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
7. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
8. Maria Lestari, S.Pd.
9. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

**2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**

4 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua

2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
4. Alien Mus

**3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**

7 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua
2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Ir. Sumail Abdullah
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
6. Ir. T. A. Khalid, M.M.
7. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

**4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**

6 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. H. Charles Meikyansah
5. Yessy Melania, S.E.
6. Julie Sutrisno

**5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**

5 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan/Wakil Ketua
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
4. Drs. H. Ibnu Multazam
5. Edward Tannur, S.H.

**6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
4. Muslim, S.HI, M.M.

**7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**

5 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.
5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**

4 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.

2. Haerudin, S.Ag., M.H.
3. Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.
4. Slamet Aryadi, S.Psi.

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)**

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

**10. Sekretariat Jenderal**

**B. Pemerintah:**

1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
6. Dr. drh. I Ketut Diarmita, M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
7. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
8. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
9. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
11. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian).

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Pertanian beserta jajarannya,  
Serta hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat. Sebelum Rapat Kerja ini dimulai saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Bapak dan Ibu yang menjalankan diberi kesabaran dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan III Tahun 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 27 Maret 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 31 Maret 2020, pada hari ini Senin, 4 Mei 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dalam rangka membahas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2020 dalam memenuhi ketersediaan pangan serta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 Peraturan Tata Tertib Rapat Kerja ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB)**

Rapat hari ini kita mulai pukul 13.30 WIB, Insya Allah pukul 15.00 WIB sudah dapat kita selesaikan. Apabila belum dapat dilanjutkan sesuai dengan dengan Pasal 226 Ayat (1) Tata Tertib. Susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Pertanian terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;  
Yang nomor 3 ini saya minta dengan hormat pada semua Anggota Komisi IV DPR RI hari ini saya rasa tidak perlu membahas masalah teknis, karena kemarin masalah teknis sudah kita bahas dan sudah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I bahkan sudah ada kesimpulannya.
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Setelah melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh Eselon I Kementerian Pertanian sejak tanggal 27 hingga 29 April 2020 yang lalu, pada hari ini kita melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian untuk membahas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2020 untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Komisi IV DPR RI telah memberikan rambu-rambu kepada seluruh mitra kerja Komisi IV DPR RI dimana fokus kegiatan dan realokasi anggaran adalah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal ini petani.

Khusus untuk Kementerian Pertanian Komisi IV DPR RI meminta agar kegiatan haruslah fokus kepada peningkatan produksi dalam rangka pemulihan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional terutama pasca COVID-19. Saudara Menteri Pertanian, setelah mencermati bahan rapat Rapat Kerja yang telah disampaikan sebelumnya, Komisi IV DPR RI sekali lagi menegaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini adalah dalam menyusun kegiatan lebih menitik beratkan atau mengutamakan kepada kegiatan yang berdampak langsung kepada peningkatan produksi di tingkat petani. Sekaligus memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat secara umum.

Oleh sebab itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun anggaran tidak sekedar memenuhi angka yang direalokasikan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah memangkas kegiatan yang tidak penting dan tidak dapat dilaksanakan karena situasi saat ini. Komisi IV DPR RI melihat bahwa Kementerian Pertanian belum mematuhi arahan Presiden Republik Indonesia, dimana anggaran untuk pemeliharaan kantor, biaya rapat, perjalanan dinas masih tinggi.

Saudara Menteri Pertanian dan seluruh jajarannya.

Kita harus terbuka dan transparan terhadap kegiatan dan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Apabila seluruh pihak bersepakat bahwa tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi, maka kegiatan yang disusun haruslah bersentuhan langsung dan mengakomodir kebutuhan petani dalam upaya peningkatan produksi hasil pertanian, seperti bantuan benih, alat mesin pertanian dan sarana produksi lainnya.

Oleh sebab itu, hendaknya apa yang telah menjadi kesepakatan pada Rapat Kerja tanggal 16 April 2020 yang lalu menjadi acuan kita semua dalam penetapan jumlah bantuan yang diberikan kepada petani secara langsung. Petani tidak membutuhkan rapat-rapat dan dukungan manajemen kantor serta rehabilitasi kantor pada saat ini. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali point-point tersebut di atas.

Selanjutnya agar dalam Rapat Kerja ini semua kegiatan bantuan kepada petani dipulihkan kembali. Bilamana perlu volumenya ditambah sehingga para petani kita benar-benar merasakan kehadiran Pemerintah cq. Kementerian Pertanian di masa sulit pandemi COVID-19 ini. Mohon menjadi

perhatian bagi kita semua bahwa yang dilakukan saat ini adalah bukan pemotongan anggaran pertanian melainkan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang berdampak langsung kepada kepentingan kepada petani seluruh Indonesia.

Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, saya mengharapkan respon positif dari saudara Menteri kerja sama yang baik serta tanggapan para Anggota Komisi IV DPR RI seperti tadi yang saya katakan kita sudah tidak membahas masalah teknis, karena masalah teknis sudah selesai. Tapi kalau ada Anggota Komisi IV DPR RI yang mau bertanya ya silakan.

Demikian pengantar ini kami sampaikan selanjutnya kami persilakan kepada saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas.

Kami persilakan Bapak Menteri.

**MENTERI PERTANIAN (Dr. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

*Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi srahlī sodri waya sirli amri wahlul uqdatan millisani yafqohu qauli.*

Pimpinan, Ketua dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang sangat saya hormati dan kami muliakan,  
Jajaran Eselon I dan II Kementerian Pertanian,  
Hadirin sekalian yang sangat kami hormati.

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat. Selain itu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan, semoga puasa kita diberi kelancaran dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Mengawali Rapat Kerja perkenan saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI atas kesempatan Rapat Kerja pada sore hari ini dengan agenda refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Pada kesempatan Rapat Kerja hari ini, saya beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang telah menyampaikan berbagai masukan, saran, sebagaimana terungkap dalam kesimpulan Rapat Kerja tanggal 16 April 2020 laporan hasil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat tanggal 27 sampai dengan 29 April 2020. Saya mengikuti secara seksama Ketua dan para Anggota dinamika Rapat Dengar Pendapat. Begitu banyak saran dan masukan yang konstruktif dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka Rapat Dengar Pendapat tersebut. Dan telah kami dalami, tindaklanjuti dan menjadi perbaikan dalam menyusun usulan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian 2020 untuk memenuhi ketersediaan pangan.

Kami sekali lagi dari hati yang paling dalam menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI. Saya jadikan sebuah proses pembelajaran yang sangat dalam di dalamnya tentu banyak yang kurang, banyak yang perlu kita benahi, khususnya jajaran Kementerian Pertanian Insya Allah pada masa-masa yang akan datang saya berharap hal-hal seperti ini bisa lebih sempurna dari apa yang Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI selama ini capai. Saya akan mencoba lebih prihatin, lebih mendalami semua langkah yang akan diambil. Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih kita rasakan dampaknya terhadap kehidupan keseharian yang ada. Kementerian Pertanian terus berupaya untuk menangani dampak pandemic COVID-19 tersebut sesuai dengan arahan kebijakan Pemerintah, serta saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI dalam tantangan pemenuhan kebutuhan pangan bagi 260 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, kami berkomitmen dalam menyelenggarakan bantuan Pemerintah berupa secara adil, merata, transparan, akuntabel, serta mencakup wilayah yang lebih khusus kepada aspirasi atau Dapil Anggota Komisi IV DPR RI sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terkait dengan upaya tersebut Kementerian Pertanian meningkatkan sasaran bantuan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan petani atau masyarakat, baik itu meliputi:

1. Bantuan benih dan bibit.
2. Bantuan Alsintan pra dan pasca panen.
3. Pengembangan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO).
4. Pengembangan KLPL.
5. Padat karya, infrastruktur petani pedesaan.
6. Bantuan pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan bantuan kegiatan seperti diuraikan di atas. Maka Kementerian Pertanian telah menghitung kembali secara cermat realokasi anggaran masing-masing

Eselon I, maupun pergeseran anggaran antara program Eselon I di Kementerian Pertanian.

Realokasi anggaran internal beberapa Eselon I diuraikan sebagai berikut:

1. Dirjen Tanaman Pangan sebesar Rp338 miliar diperuntukan bagi peningkatan bantuan Alsintan pasca panen, pengembangan jagung serta pengembangan kacang-kacangan yang lainnya.
2. Dirjen Perkebunan sebesar Rp66 miliar untuk mendukung kegiatan pasca panen dan pengelolaan hilirisasi serta pemasaran hasil perkebunan antara lain alat pengolahan pasca panen dan bantuan benih.
3. Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan sebesar Rp218 miliar untuk mendukung kegiatan pengembangan ... potong, antara lain domba, kambing, dan sapi.
4. Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian sebesar Rp822 miliar diperuntukan bagi kegiatan padat karya dan infrastruktur pertanian termasuk untuk kegiatan pengadaan alat mesin pasca panen dan ... serta kegiatan bantuan Alsintan pra panen.
5. Dirjen Hortikultura sebesar Rp85 miliar mendukung kegiatan pengelolaan dan pemasaran hasil hortikultura, alat pengelolaan pasca panen serta bantuan benih tanaman obat dan sayuran.
6. Dirjen Ketahanan Pangan sebesar Rp87 miliar guna mendukung kegiatan perkarangan pangan lestari dan lembaga institusi pangan.

Selain melakukan realokasi anggaran internal Eselon I seperti diuraikan di atas, selanjutnya Kementerian Pertanian juga melakukan pergeseran anggaran program antara Eselon I sebesar Rp435 miliar yang dipotong dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp52,97 miliar, BPSDMP sebesar Rp151,68 miliar. Badan Litbang Pertanian sebesar Rp194,22 miliar. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp35,97 miliar. Anggaran hasil pemutaran sebesar Rp425 miliar tersebut dipindahkan kepada Dirjen Tanaman Pangan sebesar Rp163 miliar dan Dirjen PSP sebesar Rp262 miliar.

Perlu kami laporkan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, bahwa anggaran pada Sekretariat Jenderal, BPSDMP, Badan Litbang Pertanian dan Badan Karantina Pertanian dilakukan secara rasional dan proporsional dengan mempertimbangkan semua masukan dan hasil akhir dari Rapat Dengar Pendapat tanggal 27 April 2020. Atas dilakukan dengan mempertimbangkan perhitungan kemudian terjadi pagu minus khususnya di Badan PSDMP dan Badan Litbang Pertanian serta kemungkinan terjadi stagnan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Karantina Pertanian dan Sekretariat Jenderal.

Selain pertimbangan tersebut, pemotongan anggaran dengan memperhitungkan keberlangsungan organisasi dan operasional pegawai, baik di BPSDMP, Badan Litbang Pertanian serta Badan Karantina Pertanian yang memiliki jumlah UPT dan pegawai scoop lainnya tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Selanjutnya terkait dengan rincian realokasi anggaran secara lengkap untuk seluruh Eselon I Kementerian Pertanian dapat dilihat sebagaimana pada lampiran bahan yang telah kami kirimkan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,  
Hadirin sekalian.

Besar harapan kami melalui Rapat Kerja hari ini refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang kami usulkan mendapatkan dukungan Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat. Insya Allah Kementerian Pertanian tidak akan jalan sendiri, selalu saja dan selalu bersama-sama dengan segenap Anggota Komisi IV DPR RI. Saya selalu yakin apa hasil Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja yang ada ini adalah hasil maksimal. Dan saya memiliki keyakinan untuk besok kita akan masuk lebih sempurna dari apa yang ada.

Mohon maaf kalau ada yang kurang Pimpinan dan segenap Anggota Dewan. Saya bertanggungjawab pada seluruh Dirjen saya dan Kepala Badan saya. Saya akan coba menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan kita bersama, Insya Allah. Kalau ada yang kurang mohon selalu saya diingatkan untuk melakukan penyempurnaan bersama dengan Sekjen dan seluruh Kepala Badan dan Dirjen di Kementerian Pertanian.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja hari ini, apabila masih perlu penjelasan lebih rinci saya mohon perkenan Pimpinan, pejabat Eselon I yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tambahan kalau dibutuhkan.

Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI dan segenap unsurnya kami sampaikan terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih atas penjelasannya.

Jadi kalau kita lihat disini Pak Menteri, ada perbedaan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan yang keputusan Rapat Dengar Pendapat yang kemarin dengan Rapat Kerja hari ini. Antara lain di Balitbangtan kami mengusulkan Rp550 miliar, tetapi di sini bahan yang kami terima realokasinya 2.194.218.750 begitu juga di BPSDMP kami mengusulkan Rp430 miliar tetapi Rp151 miliar. Karena apa? Kami ingin peningkatan produksinya cepat. Kemudian disini juga Karantina kemarin waktu Rapat Dengar Pendapat kita sudah putuskan Rp150 miliar. Dan sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak, tetapi disini Rp35 miliar. Kami masih menemukan di Karantina perjalanan dinas luar negeri.

Kemudian keluhan petani saat ini, pada saat panen mereka tidak bisa menjual gabahnya karena kadar airnya terlalu tinggi. Tahun lalu, periode yang lalu sudah membuat pencaangan 1000 dryer atau pengering, tetapi sampai saat ini tidak ada. Usulan kami dari Komisi IV DPR RI dan kesepakatan Poksi, kenapa sih tidak diadakan dryer mini untuk Gapoktan yang kalau bisa bahan bakarnya sekam, kayu, atau gas, karena kalau BBM mereka tidak bisa beli pakai dirigen kepada pom bensin umum. Ini loh yang menjadi focus kami.

Dan satu lagi hal yang sangat janggal yang jadi trending topik antara lain, disini ayam lokal yang lalu volumenya 35 ribu, anggarannya 26.961.573 tetapi sekarang volumenya kosong. Ini bahan yang kami terima kosong ini Pak Menteri, silakan dilihat nomor 15. Ini ada apa, tiba-tiba ada lagi tulisan pembayaran sisa pekerjaan kegiatan bantuan ayam rumah tangga RTM tahun 2019 atau dengan istilah umumnya yang lalu ayam bekerja. Sudah tahu ayam bekerja ini bermasalah kenapa harus diulangi lagi. Saya minta penjelasan perihal 35 ribu ekor yang lalu tetapi sekarang hilang.

Yang kedua, saya tidak mempermasalahkan volume. Contoh, volume bantuan ternak babi yang lalu itu 550 ekor tiba-tiba sekarang menjadi 1000 ekor. Dan harganya tetap Rp9 juta lebih per ekor, karena kalau mau peternak babi itu tidak mungkin babi yang besar, pasti babi dari yang kecil. Nah, nanti tolong dicek ulang lagi suruh Eselon I. Jangan kesalahan yang lalu sudah salah, kami ingatkan tambah salah lagi. Ini loh yang menjadi, semua komponen masyarakat bertanya sama saya apakah benar atau mengada-ada saya bilang "benar, orangnya bahannya ini dari Kementerian Pertanian cq. Dirjen PKH".

Ini yang menjadi catatan nanti kita ambil kesimpulan yang terbaik, misi Bapak Menteri sama misi kami Komisi IV DPR RI sama, meningkatkan produksi pangan, jangan sampai kekurangan pangan, karena dari signalnya Presiden sangat focus sekali kepada pangan, terutama kebutuhan 9 bahan pokok.

Sementara itu dulu kemudian Anggota ada yang akan bertanya dimulai dari yang mulia sahabat saya, Pimpinan Komisi IV DPR RI Bapak Dedi Mulyadi.

Silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):**

Terima kasih.

Yang terhormat di pertuan agung Ketua Komisi IV DPR RI yang rajin memimpin rapat dalam setiap waktu, para Wakil Ketua, para Anggota, Bapak Menteri dan para Dirjen yang saya hormati.

Saya focus kepada persoalan pertanian tanaman pangan dan peternakan. Yang pertama bahwa COVID-19 hari ini itu sebenarnya seharusnya menjadi berkah bagi para petani, dimana musim tanam tahun ini

lagi panen, walaupun panennya tidak sebaik tahun lalu, produksi gabahnya hampir hilang setengahnya, karena curah hujan yang relative sangat tinggi menjelang panen. Tetapi harga gabah dipasaran rendah, selain harga gabah dipasaran rendah juga curahnya tinggi akan berdampak kepada semakin beratnya beban para petani karena bobot gabahnya menjadi tidak sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Sehingga saya mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi IV DPR RI agar segera didorong untuk kalau saya istilah pengering gabah digital, sehingga para petani itu tidak mengalami problem menumpuknya gabah dengan bobot yang tinggi tetapi basah. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, gabah juga ketika diproduksi mengalami antrian karena rata-rata mesin diesel pertanian, mesin penggiling gabahnya itu sudah tua-tua, umurnya sudah rata lebih dari 10 tahun, sehingga produktifitas gabah dari mesin-mesin itu menjadi tidak sesuai dengan harapan. Harapan saya Kementerian Pertanian coba mulia menurunkan mesin-mesin pengelola gabah, penggiling gabah untuk ... dengan kualitas mesin yang terbaik. Sehingga nanti ada dua hal yang bisa ditempuh, satu gabahnya sudah dikeringkan dengan perangkat yang dimiliki sehingga bobot kadar airnya menjadi rendah dan yang kedua mesin penggilingnya baik.

Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi problem itu dikalangan buruh tani. Seiring dengan perkembangan mesin pertanian semakin baik, alat untuk merontokan padi sudah ada yang bermesin, ada yang besar, ada yang kecil dan ada yang sedang. Nah, kalau yang besar dan yang sedang menimbulkan problem bagi buruh tani, karena jumlah penghasilan mereka mengalami penurunan, padahal buruh tani itu merupakan kelompok masyarakat rendah yang harus mendapatkan perlindungan. Sehingga saran saya adalah mesin-mesin untuk perontok gabah itu diperbanyak yang kecil-kecil yang bisa diserahkan para buruh tani. Kalau buruh tani punya mesin yang kecil-kecil maka dia bisa memotong padi dengan jumlah banyak yang pada akhirnya bagi hasil yang punya tanahnya menjadi banyak di saat perorangan ataupun kelompok. Ini akan mendorong sector ekonomi terutama para buruh tani yang memiliki peran yang besar.

Kemudian yang ketiga adalah bahwa jumlah PHK itu semakin tinggi, baik pada sector formal maupun pada sector informal, karena berhentinya pekerjaan-pekerjaan informal. Untuk itu, dunia pertanian harus bisa mencari solusi dengan mendorong diperluasnya areal pertanian. Diperluasnya areal pertanian tidak perlu memerlukan pembuatan areal pertanian di Kalimantan yang memerlukan waktu yang cukup lama ditambah lagi tanahnya elum tentu cocok untuk produksi. Sehingga di daerah Jawa atau di daerah Sumatera yang tanah-tanah kering bisa digunakan dengan Padi Gogo atau Padi Puma. Dan salah satu lembaga yang ada di Subang itu Sukamandi sudah bisa menghasilkan benih Padi Gogo yang sangat memadai di umur 3 bulan. Jumlah itulah yang harus dimasukkan dan dikuatkan dalam penetapan hari ini, sehingga kita bisa menambah di bulan November atau Desember menjelang panen nanti bulan Februari atau Maret jumlah produksi semakin tinggi berdasarkan penambahan volume produksi di tanah-tanah kering yang terhampar, baik itu areal milik HGU yang terlantar atau tanah-tanah terlantar

yang jumlahnya ratusan ribu hektar kalau kita identifikasi dan itu tanah negara kebanyakan. Nah, seluruh program ini bisa terintegrasi dengan baik.

Yang terakhir adalah para Anggota Komisi IV DPR RI ini, itu juga harus bisa diwilayahnya masing-masing memberikan stimulus bagi para buruh tani terhadap berbagai problem yang terjadi saat ini, misalnya didorong ikannya, didorong dagingnya, didorong ayamnya bagi mereka sehingga mereka bisa menambah luas cakupan areal cangkunya. Jadi stimulusnya bisa diberikan oleh dua, yang punya tanah dan diberikan stimulus oleh Pemerintah. Sehingga produktifitas pertanian itu bisa meningkatkan terutama menyongsong musim tanam sekarang dan musim tanah nanti di bulan November dan Desember.

Kemudian yang terakhir, padat karya harus terus didorong karena yang kuli-kuli nyangkul ini tidak boleh kehilangan pekerjaannya. Tukang kuli-kuli nyangkul yang biasanya nyambi menjadi kuli nyangkul di kampung kemudian menjadi kuli gali di Jakarta dan di kota-kota lainnya bisa didorong hari ini untuk kuli nyangkul memperbaiki saluran-saluran air yang mengalami penyempitan atau desementasi terutama saluran-saluran air yang kecil, yang orang Sunda bilang Kungkungan. Nah, inilah barangkali hal yang bisa dilakukan dalam mempercepat sehingga kita tidak bisa menunggu lama lagi.

Terima kasih Bapak Ketua yang di pertuan agung.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih, *nuhun* Kang Dedi.

Selanjutnya Mbak Luluk.

Silakan.

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri yang saya hormati dan juga rekan-rekan Komisi IV DPR RI.

Semoga semuanya sehat ya Pak Menteri, *Alhamdulillah*. Pak Menteri, saya masih ada di Dapil sampai sekarang, itu artinya saya punya kesempatan untuk sering ketemu dengan petani, kelompok tani juga buruh tani. Juga hampir setiap saat bisa menerima keluhan mereka terkait dengan situasi yang mereka hadapi saat ini. Yang mana rata-rata bahwa mereka merasa mengapa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat jarang sekali yang

membicarakan terkait dengan nasib para petani. Mereka mengikuti pemberitaan Bapak Menteri, bahwa semenjak Presiden ketika mengumumkan stimulus yang sekian ratus triliun itu, maka nama petani juga dilewatkan. Dan stimulus itu meskipun judulnya stimulus ekonomi tetapi memang lebih banyak bicara tentang industry, korban PHK, dan lain sebagainya termasuk Ojol. Bolak-balik itu Ojol sampai kemudian program Kementerian itu juga ada bantuan dengan judul khusus untuk Ojol-Ojol ini.

Nah, sementara ironisnya di negara-negara lain pada hari ini yang memiliki pengalaman yang sama dengan situasi kita mereka justru mengalokasikan anggaran yang tidak main-main untuk memastikan bahwa produksi itu tetap jalan dan bahkan dibiarkan. Dan mereka juga mendukung agar petani ....

**KETUA RAPAT:**

Nanti Mbak Luluk dipending dulu.

Silakan Bapak Johan dari NTB silakan.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Ketua yang sering menyapa, sehat selalu, Bapak Menteri yang saya hormati beserta jajarannya, teman-teman Komisi IB DPR RI.

Secara teknis yang sudah kita bahas bersama Eselon I kemarin, sudah juga diantarkan sama Ketua. Karenanya, pada kesempatan ini saya mungkin bicara tentang kebijakan saja. Salah satunya adalah stimulus yang disampaikan kemarin itu yang kemudian disampaikan oleh Dirjen PSP, Tanaman Pangan atau Sekjen bahwa ada bantuan Rp600 ribu untuk 2,4 juta petani yang Rp300 ribu BLT, Rp300 ribu Bantuan Sarpras. Nah, sayangnya bantuan ini tidak disalurkan melalui Kementerian Pertanian. Kasihan Bapak Menteri tidak dipercaya sama Presiden, tapi disalurkan melalui Kemendes.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Johan, saya potong sedikit.

Bukan Presiden tidak percaya sama Kementerian Pertanian, tetapi Presiden ingin berbagi tugas, karena bebannya Kementerian Pertanian ini berat sekali. Sudah Rp7 triliun tapi harus meningkatkan produksi, kan bensinnya tidak cukup juga.

**F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):**

Nah, akibatnya karena tidak diserahkan kepada Menteri Pertanian, saya kemudian cek di Kepala Desa-Kepala Desa Bapak Ketua, itu tidak ada

untuk Sarpras, semuanya BLT Rp600 ribu. Apakah anggaran itu ataukah anggaran lain saya tidak tahu, tapi jumlahnya Rp600 ribu untuk melalui Kementerian Desa dan itupun bukan dari anggaran pusat, tetapi digunakan dari dana desa yang sudah ada dengan mengharuskan mengambil 30%. Nah, inikan harus menjadi catatan kita jangan sampai mengatas namakan petani, karena atas namanya 2,4 juta petani Pak Ketua, tetapi dananya tidak turun sebagai dana stimulus, tetapi disuruh ambil dari dana desa Rp600 ribu per orang. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan inikan minimal ada 3 unsur Bapak Ketua, koreksi kalau salah. Kita bicara stock itu cukup, distribusinya merata, dan masyarakat bisa mengakses pangan itu. Nah, kita bicara tentang produksi, bagaimana kita bicara tentang kecukupan stock kalau misalnya anggarannya sudah dipotong Rp7 triliun. Belum lagi kita lihat Dirjen PSP, Dirjen Tanaman Pangan itu banyak sekali dipotong. Nah, karenanya Pak Menteri, tolong jelaskan kepada kami karena ini juga menjadi dokumen publik. Kira-kira apa strategi Bapak Menteri untuk menyikapi tugas dari Presiden ini untuk menyediakan makannya orang sekian juta yang Bapak sebutkan tadi itu dengan pemotongan anggaran yang sangat signifikan ini.

Yang kedua adalah bagaimana Bapak Menteri bisa meyakinkan kepada Presiden biar tidak sama datanya dengan Kementerian. Dalam setiap Rapat Kerja kita dengan Bapak Menteri, Bapak Menteri selalu mengatakan bahwa stock kita aman, tetapi dalam Ratas terakhir Presiden menyampaikan ada sekian daerah, ada 17 provinsi, ada 88 kabupaten, ada 936 kecamatan yang masuk dalam rawan pangan kronis. Bahkan ada 31 provinsi itu mengalami defisit pangan, sementara Bapak Menteri selalu mengatakan stock aman, bagaimana Bapak Menteri bisa meyakinkan Presiden tentang ini.

Terus yang terakhir Bapak Menteri, adalah saya berterima kasih kepada Bapak Menteri walaupun ini belum dilaksanakan. Saya baru baca berita saja bahwa ada rencana dari Badan Ketahanan Pangan itu membeli bawang dari Bima, Nusa Tenggara Barat, karena Brebes belum panen. Ini stock produksi di Bima itu ada dan Bapak berencana melalui Badan Ketahanan Pangan untuk membeli bawang Bima. Informasi ini saja sudah melegakan para petani bawang di Bima, karenanya saya sebagai wakil mereka mengucapkan terima kasih dan itu yang seharusnya menurut saya begitulah seharusnya. Yakinkan Menteri Perdagangan, yakinkan Presiden jangan ambil stock dengan impor. Kalau kurang stock di daerah lain ambil dari daerah surplus, ambil dari sentral-sentral produksi kita, kurang bawang di Jakarta ambil dari Bima. Kurang bawang putih ambil dari Sembalun, kurang daging kerbau ambil dari Sumbawa. Nah, itu yang saya inginkan dan itu strategi. COVID ini menurut saya harus dijadikan sebagai upaya kita untuk meningkatkan produksi dalam negeri kita bukan menggantungkan kepada impor apalagi daerah-daerah produsen seperti Thailand dan Vietnam sudah berkomitmen bahwa mereka tidak akan ekspor, mereka akan konsen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri karena kondisi ini belum bisa diprediksi sampai kapan.

Jadi mungkin itu Bapak Ketua, secara kebijakan saya bertanya kurang lebih mohon maaf.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bapak Johan.

Selanjutnya Bapak Khalid.

Silakan Pak Khalid.

**F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):**

Siap Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Ketua yang kami muliakan,  
Pimpinan beserta seluruh jajaran Komisi IV DPR RI yang kami hormati,  
Bapak Menteri dan seluruh jajarannya yang kami banggakan.

Ijinkan sebenarnya tadi apa yang telah disampaikan Bapak Johan sebenarnya tentang menyangkut dengan yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian menyangkut Rp600 ribu bantuan kepada para petani sebanyak 2,4 juta petani. Tadi sebenarnya sudah dipertanyakan oleh Bapak Johan saya tidak memperpanjang disini, yang pertama sekali saya juga ingin mendapat penjelasan daripada Bapak Menteri sedikit bagaimana skema Pemerintah khususnya menyangkut tentang bidang pertanian sehingga Menko Maritim menyampaikan itu tanpa melalui pertanian. Padahal harus kita pahami bahwa yang mengerti kondisi petani, mengerti jumlah data petani sebenarnya kita pertanian. Tapi kalau dilakukan dengan pembantuan tidak secara dilibatkan pertanian menurut saya pasti akan terjadi tumpang tindih. Saya dalam hal bantuan ini perlu mendapatkan informasi secara lebih tajam dan mendalam lagi dari Bapak Menteri, nanti saya mohon diberikan penjelasan lebih konkrit menyangkut dengan bantuan Rp600 ribu kepada petani miskin.

Yang kedua Bapak Menteri, saya berharap refocusing ini dapat segera kita tuntaskan agar kita punya gerakan, kita memang dituntut berpikir cepat tetapi kita juga harus bergerak cepat agar dalam satu bulan kedepan ada langkah nyata yang dirasakan oleh pertanian. Sekali lagi saya memohon, saya sudah dua bulan di Aceh saya belum merasa hadirnya Kementerian Pertanian di Aceh. Mungkin di tempat lain sudah hadir, tapi saya di Aceh belum hadir. Maka oleh karenanya saya berharap satu bulan kedepan ada gerakan dari Kementerian Pertanian, baik dalam bantuan langsung maupun alat-alat pertanian dapat kita berikan kepada masyarakat.

Jujur Bapak Menteri, kita sebenarnya petani tidak imbas dengan COVID-19, tidak ada imbas yang imbas cuma dipemasaran saja, tetapi di turun ke sawah dan sebagainya tidak. Maka sebenarnya ini kesempatan sebagaimana Bapak Dedi Pimpinan sampaikan, ini kesempatan kita bagaimana bangkit negara harus mengambil anggaran dari Kementerian lain untuk membantu pertanian agar Insya Allah COVID selesai, Indonesia tetap dalam pengamanan pangan.

Saya pikir ini Bapak Ketua, saya minta penjelasan menyangkut Rp600 ribu per petani miskin. Saya ingin mendapatkan informasi lebih konkrit.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Suhardi Duka.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi IV DPR RI,  
Yang saya hormati Bapak Menteri bersama dengan seluruh jajaran Eselon I.

Kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya kita kecewa dengan pemotongan yang terlalu besar, sebesar Rp7 triliun untuk anggaran Kementerian Pertanian. Di satu sisi ini adalah tergantung dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, kita minta kepada Bapak Menteri untuk bisa memberikan penjelasan yang mandalam dan luas kepada Bapak Presiden dan meyakinkan kepada Presiden bahwa sesungguhnya anggaran Kementerian Pertanian itu untuk rakyat, untuk petani dan untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan dari dampak COVID-19 ini. Nah, kalau ini tidak dijelaskan secara baik, maka saya khawatir langkah-langkah berikutnya akan dilakukan pemotongan lagi. Kalau terjadi pemotongan lagi saya kira saya tidak memberikan jaminan bahwa Indonesia akan terjamin pangan kedepan.

Oleh karena itu, saya kira harus jujur mengatakan bahwa di beberapa daerah memang surplus tetapi di banyak daerah juga itu banyak hambatan-hambatan sehingga terjadi kelangkaan pangan sebagaimana juga yang sudah disinyalir oleh Bapak Presiden Bapak Jokowi. Jadi saya kira dua sisi kita harus memberikan pandangan kepada Presiden, sisi pertama adalah sisi optimis bahwa tingkat kekhawatiran kita jangan terlalu khawatir tapi tidak bisa juga terlalu confident kita untuk mengatakan aman pangan sampai dengan tahun 2020 ini. Oleh karena itu, kita harap bahwa refocusing yang akan

datang tidak lagi menjadikan Kementerian Pertanian sebagai Menteri yang mendapatkan pemotongan anggaran. Itu yang pertama.

Yang kedua, setelah kita rapat yang cukup panjang dan cukup alot dari masing-masing Eselon I saya melihat bahwa ada beberapa hal. Yang pertama Dirjen TP, fasilitasi pada .... Yang tadinya Rp120 miliar menjadi Rp30 miliar ini barangkali perlu sedikit penjelasan. Untuk hortikultura kawasan barang merah dihapus, saya juga minta penjelasan. Kemudian sarana peningkatan nilai tambah horti Rp67 miliar. Kemudian penanggulangan dampak COVID terhadap keberlanjutan usaha horti Rp39 miliar, apa yang ingin dibiayai itu perlu penjelasan.

Kemudian Dirjen BUN, saya mensupport karena sudah memberikan penambahan terhadap benih dan bibit untuk tanaman-tanaman yang strategis yang telah disampaikan oleh para penangkar-penangkar yang ada di daerah. Kemudian PSP saya juga sedikit support karena UPPO anggarannya dikembalikan bertambah sedikit saya berikan support. Hanya saja saya minta di PSP ini ada harapan dari 4 kepala dinas yang ada di Sulawesi Barat dia sudah sosialisasikan kepada calon penerima jagung kemudian padi, yaitu terhadap pupuk cair. Jadi saya minta kepada PSP ini supaya bisa mengalokasikan khusus untuk petani jagung dan petani padi mata anggarannya kurang lebih Rp10 miliar. Saya kira itu untuk PSP.

Kemudian yang terakhir adalah saya kira implementasi cepat ya karena rakyat sudah menunggu, begitu juga kita Anggota DPR RI yang ada di Dapil ini. Saya juga menunggu apa stimulus yang diberikan kepada konsituen kita.

Saya kira begitu Bapak Ketua.

Terima kasih Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Suhardi.

Selanjutnya Ibu Endang.

Silakan.

**F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):**

Terima kasih Bapak Ketua yang saya banggakan.

Bapak dan Ibu para Eselon I khususnya Bapak Menteri Pertanian yang saya hormati dan saya banggakan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Tadi sudah dikemukakan oleh teman-teman tentang stimulus Pak, kebetulan saya membaca di beberapa media tentang keberhasilan Badan

Litbang Pertanian menemukan obat herbal anti corona yang berasal dari minyak kayu putih. Nah, ini sangat membanggakan kita semua Pak, karena korban-korban dari COVID-19 ini sangat memprihatinkan terutama para buruh tani kita yang ada di daerah-daerah.

Nah, untuk itu apakah tidak ada *policy* dari Bapak untuk memberikan stimulus berupa tadi obat-obatan yang sudah diketemukan, obat-obatan herbal karena ini momentum yang baik untuk mendapatkan herbal-herbal yang berasal dari potensi lokal. Karena DPR RI saat ini sedang dibully juga dengan adanya herbal-herbal yang tambahan yang dari luar. Nah, ini momentum yang baik bagi Badan Litbang Pertanian khususnya dan Dirjen Hortikultura untuk mengembangkan potensi-potensi lokal kita yang sudah turun menurun dipakai oleh nenek moyang kita Pak. Nah, ini perlu ada *policy* dari Bapak Menteri Pertanian untuk memberikan insentif kepada buruh tani dan juga kepada para teman-teman yang sekarang ini di PHK memerlukan bantuan-bantuan tersebut.

Yang kedua Pak, Direktorat Jenderal Hortikultura apakah tidak ada Pak, ide untuk menciptakan lapangan kerja yang mudah dilakukan di rumah, misalnya tentang bagaimana untuk memperkuat industry-industri lokal yang ada di perumahan tentang pembuatan misalnya hasil-hasil dari tanaman hias, dari bunga-bunga yang banyak dihasilkan sekali oleh petani-petani Cianjur yang sekarang keadaannya semakin terpuruk. Nah, ini suatu hal momentum yang bagus.

Yang ketiga tentang bawang putih Pak, di Cianjur juga banyak bawang putih yang sekarang sedang mulai panen tetapi belum ada gerakan dari Dirjen Hortikultura untuk ikut membantu bagaimana menampung hasil dari produksi bawang putih tersebut. Nah, kemudian yang keempat dari tanaman pangan Pak, untuk tanaman kacang-kacangan. Jadi di Cianjur ini banyak sekali hasil produksi kacang-kacangan yang belum bisa diolah dengan baik. Nah, untuk itu apakah tidak ada alat-alat yang simple yang tadi dikemukakan oleh Bapak Ketua kita yang bisa membuat Ibu-ibu kita yang ada di rumah ini mengemas dengan baik untuk membuat makanan-makanan lokal yang bergizi tinggi terutama untuk anti stunting Pak, dan bisa berkordinasi dengan KKP yang sekarang sedang membagikan bibit-bibit ikan dan juga ikannya sehingga anak-anak kita yang problem stunting bisa teratasi dengan baik.

Demikian Pak, terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Endang.  
Selanjutnya Kyai top dari Jawa Timur.

Silakan Bapak Kyai Hasan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Bagi yang beragama Islam selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadhan.

Yang terhormat Ketua yang sehat wal'afiat dan segenap Pimpinan Anggota Komisi IV DPR RI,  
Bapak Menteri H. Syahrul Yasin Limpo serta segenap jajaran pejabat Eselon I yang saya banggakan.

Saya mengapresiasi Kementerian Pertanian ini yang akan menyempurnakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Harapan yang saya inginkan Bapak Menteri judulnya sederhana mengusap air mata petani. Ini penting ini, daripada mencari-cari persoalan Pemerintah ini saya beri judul memberi solusi mengusap air mata petani. Bagaimana realokasi ini Bapak Menteri segera dilakukan kalau saudara kita dari Aceh bagaimana sebulan ada implementasi tindaklanjut dari persetujuan kita. Saya berharap sebelum lebaran ini ada implementasi dari kesempatan kita, Insya Allah 10 menit dari ini sudah bersama-sama kita setuju, karena lebih cepat lebih baik.

Solusi yang ingin saya tarakan mengusap air mata petani itu membeli seluruh hasil pertanian oleh Kementan melalui dinas mitranya. Karena hari ini banyak kepala desa itu resah statement Menteri seakan-akan sudah turun anggarannya namun kepala desa itu tunggu dan menunggu transfer dari Bupati, Walikota sehingga apa yang disampaikan oleh Bupati daerahnya Kang Dedi ini sudah tidak ada etika lagi. Seorang pemimpin di desa yang tidak hormat kepada Bupati, Gubernur, dan Presiden, menyalahkan dan menyalahkan. Saya berharap segera ada sinkronisasi dinas mitra dari Kementan ini untuk segera ditransfer dananya hasil kesepakatan kita untuk segera dibelanjakan. Belanjakan hasil petani suatu misalnya yang hari ini panen raya dibeli selanjutnya diproses dan dikembalikan lagi kepada rakyat atau buruh tani.

Yang kedua, hasil ternak ayam dibeli oleh Kementan dan selanjutnya ayam yang para pemeliharanya yang tidak bermitra dengan perusahaan, karena masih ada. Nah, itu sisiran oleh Kementan bagi peternak yang tidak bermitra dengan perusahaan dan dibeli oleh perusahaan. Dibeli dan diserahkan kembali kepada rakyat. Apa yang saya sampaikan saya tidak bisa mungkin saya telah melakukan 3 hari yang lalu, saya beli hasil kerajinan bamboo rakyat, saya beli gabah terus diproses menjadi beras, saya beli hasil perkebunan rakyat kentang dan kubis, saya beli hasil pertanian bawang merah, saya packaging saya serahkan kembali kepada rakyat. Itu sedikit mengobati dan mengusap air mata dan memberi perut rakyat tatkala akan lapar.

Hari ini Bapak Menteri di bulan suci Ramadhan tradisi di Republik Indonesia bagi semuanya setiap Ramadhan itu identic barang baru. Nah, hari ini sudah tidak identic, bagaimana perut rakyat ini terisi oleh hasil produksi dari Kementan.

Yang ketiga Bapak Menteri, saran bagaimana pupuk cair itu betul-betul ada perencanaan karena sudah banyak demplot-demplot tanah rakyat itu memakai pupuk, sekali lagi memakai bahan nonorganic sehingga produksinya beras nonorganic.

Sekian terima kasih Bapak Ketua.

Semoga apa yang kita simpulkan bersama-sama ini segera ada tindak lanjut sebelum lebaran kita bersama-sama menyapa rakyat.

*Wallahu Muwafiq Illa Aqwamithariq,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bapak Kyai, kiriman kentang, bawang sama jamunya hingga saya tetap sehat bisa memimpin rapat.

Selanjutnya Bapak Muslim.

Silakan Bang.

**F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):**

Terima kasih Bapak Ketua yang baik hati.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Ketua dan teman-teman Komisi IV DPR RI,  
Bapak Menteri beserta jajarannya.

Pertama memang saya terima kasih semangat Bapak Menteri hari ini luar biasa. Artinya apa? Ada satu kebersamaanlah khususnya Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI. Walaupun perjalanan kita ini Bapak Menteri sudah sehari-hari dengan seluruh Dirjen, saya pikir ini endingnya sangat bagus.

Yang kedua, masukan ini Pak Menteri, pandangan validasi data, terus terang menyangkut data ini menjadi perhatian khusus Bapak Menteri. Kita lihat memang pernyataan di beberapa media apa yang disampaikan Bapak Menteri dengan Presiden ini suka bertolak belakang. Tentu dalam hal ini kita berharap mengenai data pertanian khusus ketahanan pangan harus betul-betul dari Kementerian Pertanian. Kita berharap ini persoalan data ini ke

depan kita harapkan betul-betul bisa dikelola dan dimaksimalkan dengan baik karena ini menurut saya sangat substansi, kenapa? Karena menyangkut hajat hidup serta bantuan Pemerintah kepada masyarakat.

Yang ketiga tentu berkaitan menyangkut sedikit Bapak Menteri tentu saya apresiasi ada program khususnya program penumbuhan wirausaha muda pertanian atau PWUMP yang banyak melibatkan petani milenial hari ini. Saya melihat ini pertumbuhan petani milenial Indonesia ini sangat bagus termasuk berkaitan dengan agroponik, kemudian agro wisata. Saya berharap program-program ini terus dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan juga didukung anggaran. Tentu yang kedua, kerja sama dengan fakultas-fakultas pertanian di seluruh kampus di Indonesia. Ini saya pikir dengan target Kementerian Pertanian melahirkan 5,2 juta petani milenial saya harapkan ini harus betul-betul diwujudkan Bapak Menteri. Tentu ini akan kita dukung secara maksimal kedepan. Mungkin itu beberapa hal.

Terakhir Bapak Ketua, berkaitan dengan harga gula. Harga gula di Aceh terus terang masih tinggi Bapak Menteri, ini menjadi perhatian buat Bapak Menteri sampai hari ini masih Rp17 ribu. Saya berharap ini persoalan distribusi maupun importir dari gula ini betul-betul dimaksimalkan kedepan, sehingga dalam kondisi bulan Ramadhan ini harga gula bisa kembali diangka Rp12.500.

Terima kasih Bapak Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Harapan Bapak Muslim mengenai hal gula akan terselesaikan, karena hari ini Bulog baru saja masuk gula impor. Sebagian nanti saya minta tolong dikirimkan ke Aceh supaya warga Aceh tambah manis.

Selanjutnya Bapak Andi Akmal.

Silakan.

#### **F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASALUDDIN, S.P., M.M.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Menteri beserta jajaran Eselon I.

Yang pertama, saya kira memang Bapak Menteri kita harus menguatkan positioning daripada Kementerian Pertanian sebagai Kementerian yang bertugas untuk produksi di hulu. Jadi selama ini kita melihat bahwa setiap masalah harga, masalah penyerapan petani, selalu

menyalahkan Kementerian Pertanian padahal sebenarnya kita tahu bahwa urusan penyerapan adalah urusannya Bulog, urusan harga adalah urusan Kemendag. Nah, oleh karena itu Bapak Menteri, saya ingin kedepannya karena anggaran kita tinggal Rp14 triliun kita betul-betul focus ke produksi dan Bapak Menteri Pertanian bisa sinergi atau kolaborasi dengan Mendag, dengan Bulog secara baik. Karena yang disalahkan terus itu Kementerian Pertanian, ini yang tidak adil kalau sebenarnya kalau kita melihat sebagai mitra Komisi IV DPR RI. Setiap masalah pangan selalu disalahkan Kementerian Pertanian, kalau barangnya langka atau tidak ada baru sebenarnya menjadi masalahnya Kementerian Pertanian, tapi harga, tidak dibeli, tidak diserap, sebenarnya tugasnya Mendag dan Bulog. Jadi Bapak Menteri saya berharap sinergi dan kolaborasi ini betul-betul kedepannya menjadi sesuatu yang kunci daripada pembangunan pangan kita. Itu yang pertama Bapak Ketua.

Yang kedua, mengenai masalah adanya informasi defisit pangan di 7 provinsi dari data Badan Pangan. Saya kira mungkin yang kita ingin mendengarkan dari Kementerian Pertanian bagaimana distribusinya agar yang surplus ini bisa dialihkan kepada daerah yang minus. Saya kira ini menjadi salah satu tugas daripada Kementerian Pertanian. Dan mengenai Rp600 ribu per petani kalau menurut saya kita dukung walaupun dananya tidak melalui Menteri Pertanian. Sebenarnya itukan kantungnya Pemerintah kan dari Kementerian-Kementerian, dananya dari dana desa. Pemerintah inikan memberikan harapan sebenarnya PHP sebenarnya karena uangnya uang dana desa, tapi dibagi kepada petani. Kalau bagi kita Komisi IV DPR RI kita bersyukur petani mendapatkan alokasi bantuan Rp600 ribu per kepala dari dana desa. Saya kira kita dukung itu walaupun itu tidak melalui Kementerian Pertanian. Tapi tentu kita berharap Kementerian Pertanian bisa memberikan masukan-masukan ataupun data-data yang lebih baik kepada Kementerian teknis. Itu yang kedua Bapak Ketua.

Yang ketiga, saya berharap dan saya yakin Bapak Syahrul Yasin Limpo ini orang yang komitmen. Kita sudah rapat sehari-hari dengan Eselon I dalam Rapat Dengar Pendapat dan kita sudah sepakati berbagai macam hal dan hari ini adalah ketok palunya. Sekali lagi saya pribadi mengenal beliau, mengenal Bapak Menteri ini sangat komit dan mudah-mudahan kebersamaan ini bisa kita teruskan kedepannya.

Demikian Bapak Ketua, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Andi atas komitnya.

Kita semua tahu kalau Bapak Menteri orangnya komit, tetapi yang Eselon I nya belum tentu. Ini harus jelas saya sampaikan, saya sebagai Ketua harus berkata jujur.

Selanjutnya Bapak Slamet dari Fraksi PKS.

**F-PKS (dr. H. SLAMET):**

Terima kasih Pimpinan.

Ketua, rekan-rekan Anggota dan Bapak Menteri beserta jajaran Eselon I yang saya hormati.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Sedikit saja Bapak Menteri, saya ingin klarifikasi terkait yang pertama slide yang nomor 20. Jadi ada pembayaran sisa pekerjaan kegiatan bantuan ayam tahun 2019, ini mungkin perlu dijelaskan nanti ini muncul nomenklatur itu.

Yang kedua, bagaimana kemudian strategi Kementan dalam hal ini mensikapi yang pertama defisit bahan pokok yang disampaikan Bapak Presiden, yang beras di 7 provinsi, jagung 11 provinsi, cabai 23 provinsi, telur 22 provinsi dan bawang putih 31 provinsi. Saya ingin mendengarkan strategi mengatasinya. Saya juga khawatir sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman di awal tadi, pernyataan awal dari Kementerian kan selalu surplus, stock cukup, tapi kenyataannya kemudian Presiden menyampaikan defisit pakan atau juga sekarang menugaskan BUMN untuk ramai-ramai mengerjakan sawah. Dan antisipasi juga terkait dengan kelangkaan pangan yang ini disinyalir akan terjadi di seluruh dunia. Kita ingin mendapatkan gambaran terkait dengan anggaran yang memang tidak bisa dipaksa lagi dan segitu-segitunya dan justru disitulah saya ingin tahu bagaimana strategi yang akan dikembangkan dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pangan di dunia itu tidak terjadi di negara kita.

Itu saja Pimpinan, terima kasih Bapak Menteri.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H.):**

Selanjutnya Bapak Hansi Lema.

Oke, kalau tidak ada...

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Selamat siang Ibu Kiki.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H.):**

Oh, ada silakan.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Pertama saya mau menyampaikan salam hormat buat Bapak Menteri dan jajarannya. Bapak Menteri, 3 hari minggu kemarin kami sudah rapat intensif Bapak Menteri dengan staf-staf Bapak, Bapak Sekjen dan para Dirjen. Saya melihat dari materi yang diberikan terakhir ini sudah ada frekuensi yang nyambung antara Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI. Saya bisa langsung menyampaikan beberapa presentasi Pak, ada beberapa hal yang mau saya catat. Nah, disini ada datanya Pak, kalau Bapak bisa lihat di layar mungkin.

Jadi saya mulai dengan karena kemarin kita bicara per Dirjen, saya juga ingin merespon per Dirjen Pak. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan saya melihat sudah banyak apresiasi yang harus saya sampaikan. Yang pertama, soal bantuan budi daya ayam lokal itu, itu dihilangkan dan itu tanggapan saya berikan apresiasi Pak. Yang kedua, pengembangan ternak ruminansia poton, sapi lokal, kerbau ....

**KETUA RAPAT:**

Bang Hansi Lema coba diteliti dengan baik. Itu masih ada angkanya Rp26 miliar, coba dilihat dengan baik.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Saya mencatat seperti itu Pak, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi Pak. Tetapi yang saya lihat mungkin saya kurang detail tapi ini kira-kiranya angkanya yang saya tangkap sehingga....

**KETUA RAPAT:**

Pak Hansi Lema, volumenya yang hilang angka uangnya tidak hilang.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Oke.

**KETUA RAPAT:**

Saya hanya menjelaskan.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Baik Pak, berarti mohon maaf itu berarti saya harus kritisi kalau ternyata volumenya hilang angka uangnya tidak hilang kan berarti alokasinya harus dipertanyakan Pak.

Yang berikut, menyediakan pakan ternak itu saya menyambut dengan apresiasi Pak, karena itu saya lihat ada volumenya 8 ribu terus ada penambahan anggaran. Begitu juga bantuan ternak babi itu juga begitu Pak.

Selanjutnya ke Dirjen Sarana dan Prasarana, saya melihat juga padat karya itu mengalami pengurangan Pak, saya apresiasi disitu. Dan Alsintan mengalami kenaikan di beberapa jenisnya Pak, walaupun masih ada hal yang perlu saya kritisi terkait dengan pompa air, alat dan mesin pertanian pra panen, terus hand dryer dan lain-lain itu malah dikurangi Pak.

Masih di Dirjen Sarana dan Prasarana juga Pak, Unit Pengolahan Pupuk UPPO oke Pak, saya apresiasi ditambahkan sebesar Rp50 miliar. Alat mesin pertanian pra panen, traktor dan lain-lain itu ditambahkan semua Pak. Ini yang kita perlukan ketika mau melakukan produksi dan juga mendukung produktifitas petani Pak.

Di Dirjen Tanaman Pangan, saya mengkritisi soal fasilitas bantuan pangan dan distribusi terdampak COVID. Dari diskusi kita kemarin kan ini mestinya ini alokasinya itu semakin banyak tapi ini dikurangi sampai Rp98 miliar, kan perspektif pandemic itukan harus respon cepat, hasilnya langsung bisa diterima oleh masyarakat. Pengembangan kedelai oke apresiasi, diversifikasi pangan dan alternative itu saya kritisi Pak, mestinya kita munculkan produk-produk lokal kita pada saat ini Pak.

Yang berikut, soal pengembangan padi untuk stabilisasi pangan oke mengalami kenaikan sebesar Rp67,14 miliar. Pengembangan jagung saya apresiasi Pak, saya memberi catatan sedikit Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat itu lagi getol banget sama jagung, mohon didukung Pak, saya kemarin juga berharap Dirjen Tanaman Pangan bisa mendukung soal ini, apalagi jagung itu pangan alternative di Nusa Tenggara Timur Pak. Juga Alsintan pasca panen juga ditambah disini oke Pak.

Pindah kepada Hortikultura Pak, di hortikultura ini mohon maaf saya kritis Pak, pemasaran produk hortikultura itu tetap saya lihat. Nah, padahal kemarin kita juga sudah diskusikan substansinya. Bantuan penyediaan bahan pangan hortikultura untuk masyarakat itu Cuma Rp5 miliar tetap juga Pak, padahal kita tahu bahwa bantuan langsung inikan perlu Pak, buat perut rakyat. Peningkatan produksi kawasan bawang merah dan bawang putih justru dikurangi sebesar Rp8,2 miliar dan Rp9 miliar. Menurut saya selama inikan kita terlalu bergantung kepada impor, mestinya ini juga kita perkuat Pak. Dengan demikian, mestinya alokasi anggarannya bisa lebih dari sini Pak.

Masih di Dirjen Hortikultura, penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam. Ini juga mengalami pengurangan Pak, sementara tadi saya baca di instagramnya Kementerian Pertanian Bapak mengatakan Kementerian Pertanian yang saya pimpin akan bekerja lebih keras untuk benar-benar memastikan ketersediaan bahan pokok dan melakukan langkah antisipasi kemungkinan kemarau panjang Pak. Nah, mestinya hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi dan ini berkuranganya dari Rp15 miliar jadi Rp1 miliar saja. Saya kritisi soal ini Pak.

Yang berikut....

**KETUA RAPAT:**

Cukup Bapak Ansy Lema?

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Iya Pak.

**KETUA RAPAT:**

Cukup?

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Ya, kira-kira ini nanti saya sudah buat mungkin nanti saya kirim saja Pak, kalau kepanjangan.

**KETUA RAPAT:**

Nanti saya bingung kalau setiap kata ada apresiasi nanti saya berikan apresiasi kepada Bapak Hansi Lema juga.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Ada kritisi juga Pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya, terima kasih.

Selanjutnya Bapak Sutrisno.

**F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota yang terhormat,  
Bapak Menteri dan jajaran Eselon I.

Pak Menteri, saat ini semua pihak termasuk Presiden di lembaga yang terhormat bukan hanya Komisi IV DPR RI berbicara tentang ketersediaan pasokan pangan. Tentunya sebagai jawabannya adalah tercerminkan pada rencana belanja Kementerian Pertanian. Dari yang saya cermati dari perubahan yang terakhir malah justru sebut saja di Dirjen Hortikultura pengembangan system perbenihan hortikultura, kemudian juga pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. Aktifitas kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana, yang diperlukan sekarang dalam jangka pendek itu adalah dana segar mengalir kepada para petani, agar petani sedang di masa

PSBB ini bisa makan dan kemudian bisa melanjutkan penanaman. Di sisi lain rakyat yang sedang diisolasi inipun bisa makan.

Oleh karena itu, yang seharusnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Wakil Pimpinan Bapak Kyai Hasan menurut hemat saya akan lebih baik anggaran itu bukan ditambahkan untuk beli sarana dan prasarana, tapi dibeli produk pertanian kemudian dibagikan, dua kepentingan terpenuhi. Petani dapat uang segar disisi lain rakyat juga menikmati hasil pertanian untuk dikonsumsi. Bila mana perlu bantuan sosial. Itu yang pertama.

Yang kedua Pak Menteri, tentang kebijakan asuransi usaha tani padi. Anggarannya ditingkatkan Rp157,2 miliar dan anggaran ini dari tahun ke tahun pasti tetap akan ada. Yang menjadi persoalan adalah petani sendiri tidak tahu, kami Anggota Dewan juga tidak tahu, sawah-sawah mana yang diasuransikan di Majalengka sawah kena banjir, produksinya menurun, saya komunikasi dengan Dinas Pertanian, dikatakan oleh Dinas Pertanian itu tidak termasuk bagian yang harus diklaim, yang bisa diklaim itu adalah yang Puso. Kalau demikian cuman formalitas asuransi untuk kepentingan petani, itu sesungguhnya asuransi itu untuk kepentingan perusahaan asuransi itu sendiri. Mohon untuk dikaji kembali.

Yang ketiga, tadi sudah disinggung oleh teman-teman itu tentang pembayaran atas pekerjaan tahun yang lalu, rumah tangga miskin Rp20,9 miliar. Setahu saya ada aturan tatkala saya menjadi kepala daerah bahwa tidak boleh melakukan aktifitas pembiayaan tanpa dianggarkan. Kalau ini harus mengganti artinya apa? Ada pekerjaan tahun kemarin yang tidak teranggarkan belanjanya. Kalau demikian berarti kan melanggar aturan, mohon penjelasan Bapak Menteri.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat.

Silakan Bapak Ono.

Bapak Ono tidak ada, berarti silakan Dr. Hermanto.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Ketua, Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Menteri beserta jajarannya.

Saya ingin menyampaikan tambahan bahwa anggaran Kementerian Pertanian ini sekarang jumlahnya adalah Rp14 sekian triliun, setelah mengalami pemotongan dari Rp21 triliun. Ini maknanya adalah bahwa komitmen Bapak Menteri tentang duduk bersama dan selalu bersama dengan Komisi IV DPR RI terkait dengan pembangunan sector pertanian. Dan kita minta juga Bapak Menteri untuk membahas ini di Ratas, untuk diperjuangkan supaya jumlah anggaran Kementerian Pertanian tidak mengalami perubahan penurunan. Tapi nyatanya kita menghadapi sebuah kenyataan bahwa anggaran Kementerian mengalami penurunan yang cukup besar. Dan ini tentu banyak sekali dampaknya terhadap pembangunan sector pertanian. Tentunya dari sisi ini kami juga ingin mendapatkan informasi apakah memang Bapak Menteri menyampaikan segala hal yang terkait dengan aspirasi dari Komisi IV DPR RI ingin menambah jumlah anggaran yang lebih memadai. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, karena keterbatasan oleh anggaran yang sangat sempit ini saya minta Bapak Menteri melakukan kluster prioritas mana yang lebih didahulukan dan mana yang dibelakangkan. Misalnya begini, kita ini akan berhadapan dengan masa pandemic yang waktunya yang sangat kritis, ini mohon juga ini beberapa jenis kegiatan-kegiatan di Dirjen-Dirjen ini, ini harus dikluster mana yang lebih didahulukan. Saya melihat begini, ada dua kluster dari Dirjen-Dirjen ini yang harus kita pegangan. Kluster pertama adalah kelompok yang diprioritaskan, yang kedua adalah kelompok Dirjen yang memang harus bisa dibelakangkan.

Ini adalah Dirjen-Dirjen yang diprioritaskan untuk lebih awal programnya di realisasikan itu adalah terkait dengan program-program yang ujungnya dengan COVID. Nah, ini ada kita bisa memperceat satu alokasi program atau anggaran yang tumbuhannya itu adalah berumur pendek, berusia pendek. Nah, ini tentu harus didukung Dirjen PSP, Dirjen Tamanan Pangan, Dirjen Hlorti, Dirjen BUN, PKP dan PKH. Nah, ini adalah kelompok anggaran yang didalamnya mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan mempercepat program yang lebih bisa dikonsumsi mengingat dalam waktu yang seperti diperkirakan oleh Presiden dan juga Bapak Menteri kita akan berhadapan dengan krisis pangan.

Oleh karena itu, kita harus juga mempersiapkan agenda-agenda penanaman yang berumur pendek. Saya juga sarankan dalam situasi krisis nanti saya minta supaya Bapak Menteri juga yang lebih banyak dan mudah dilakukan oleh masyarakat bukan hanya petani, itu adalah menanam singkong di halamannya. Menanam singkong ini untuk warga-warga yang memiliki lahan yang cukup diperkarangan yang tumbuhnya sangat mudah, perawatannya juga sangat mudah dan ini bisa menghasilkan panen yang lebih cepat. Nah, ini adalah menurut saya ini bagian dari kita mengantisipasi krisis pangan.

Kemudian tentunya saya berharap dengan program-program yang sudah disusun ini prioritas utamanya adalah program yang berbasis sosial. Kita minya supaya ini adalah program yang prioritaskan untuk direalisasikan dengan mempertimbangkan masa COVID dan masa lockdown yang kalau

kita lihat penerbangan kita dibatasi sampai tanggal 31 Mei penerbangan tidak ada. Saya minta supaya ini harus disesuaikan supaya Anggota bisa leluasa untuk berkunjung ke Dapilnya setelah dibolehkannya penerbangan dan transportasi. Nah, ini harus dipikirkan oleh Bapak Menteri.

Kemudian yang berikutnya adalah program yang berhubungan dengan bantuan COVID. Saya pikir ini harus bisa didampingi oleh Anggota Dewan, karena beberapa menteri juga sudah alokasi sementara Kementerian Pertanian sampai sekarang tidak ada beritanya.

Demikian Bapak Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Bagus Adhi.

Silakan.

**F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.M.):**

Terima kasih Ketua.

Yang terhormat Bapak Menteri beserta jajarannya.

Jadi saya memperdalam apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, yaitu yang terkait dengan ketahanan pangan. Seperti apa yang disampaikan Anggota tadi, ada yang sangat spesifik sekali dianggarkan dan untuk itu saya ingin menanyakan kepada Bapak Menteri bagaimana dalam ketahanan masa COVID-19 ini yang permintaan sembako sangat tinggi, yang kemudian sebentar lagi kita akan mengalami masa kemarau yang sangat panjang. Dan untuk itu, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak Menteri terkait dengan pemetaan daerah rawan. Untuk menyikapi hal-hal tersebut maka kita perlu kaji kembali mempergunakan dan atau mempunyai data base yang jelas terkait dengan hal tersebut.

Bapak Menteri, di era COVID ini petani cengkeh dan tembakau kita sangat menjerit dengan diberlakukannya PMK RI Nomor 152/PMA010/2019. Nah, ini terjadinya penurunan pembelian di petani, yaitu dari harga Rp100 ribu ke Rp60 ribu. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Menteri untuk mengkomunikasikan kepada Kementerian terkait, terkait dengan PMK tersebut. Memang ironisnya ada kenaikan cukai yang cukup tinggi, yaitu Rp125 triliun, namun disisi lain terjadi jeritan petani kita. Nah, untuk itu saya berpendapat bagaimana kita menjadikan petani ini sebagai pilar kebanggaan, pilar kejayaan bangsa kita. Untuk itu, sudah selayaknya konkrit kita kembali kepada PMK tahun 2017.

Dan yang ketiga, terkait dengan kesehatan hewan. Saat ini hewan kita banyak sekali yang didera penyakit, sapi, ayam, dan juga babi dan juga dalam situasi COVID ini terjadi penurunan harga ternah. Untuk itu, perlu sekiranya dilakukan langkah-langkah penanganan sehingga bisa kita wujudkan stabilitas harga dan menurunnya penyakit hewan.

Demikian kira-kira yang saya sampaikan kepada Bapak Menteri. Ada pandangan dan pernyataan sikap dari petani cengkeh dan tembakau yang kemudian kami akan kirim kepada Bapak Menteri untuk bisa disikapi secara konkrit dan segera.

Sekian, terima kasih Pimpinan.

Salam sehat selalu.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Kanjeng Darori.

Silakan.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Ketua, teman-teman, Bapak Menteri dan para Eselon I yang kami hormati.

Saya akan memberikan masukan-masukan kepada Bapak Menteri Pertanian. Jadi Bapak Menteri, baru kali ini kita rapat dengan Kementerian Pertanian yang terpanjang Pak. Kalau saya hitung hampir dengan Eselon I delapan kali pertemuan dengan ini. Kenapa dengan Kehutanan dan Kelautan itu tiga kali selesai. Ini Bapak Menteri untuk tidak terulang kembali kedepan tolong transparansi teman-teman Eselon I kepada teman-teman Anggota IV DPR RI itu lebih jelas. Sehingga contohnya misalkan ada kegiatan yang sudah dipihak ketigakan, kalau dari awal sudah diberitahukan kepada kita mestinya memang itu boleh-boleh saja, cuman sebelum itu disahkan dan disetujui oleh Komisi IV DPR RI itu ada pernyataan dari pihak ketiga bahwa kontrak ini tidak mengikat. Artinya apa? Pada saat nanti disetujui oleh Komisi IV DPR RI ada perubahan kontrak itu bisa dirubah. Itu yang kami lakukan dulu Bapak Menteri, bukan baru ini saja. Nah, ini selama ini nampaknya tertutup itu, sehingga teman-teman menduga-duga hasilnya panjang.

Terus yang kedua juga Bapak Menteri, kita minta kepada teman-teman Eselon I itu focus kepada Tupoksinya, sehingga tidak tumpang tindih. Ini sangat berbahaya, ini pengalaman kami Bapak Menteri beli sepeda motor

pada Eselon I berbeda agen yang sama selisih Rp500 ribu jadi masalah di penegak hukum, panjang sampai meninggal itu bendaharanya. Jadi ini jangan sampai terjadi, beli ayam beda-beda nanti bisa bermasalah. Ini yang saya ingatkan.

Saya tidak teknis tapi juga ini ada data yang kalau kami cermati Pak, contohnya mengenai penyuluh, penyuluh ini meninggal mendadak atau memang berkurang atau salah hitung. Contohnya, pagunya 43.150 orang, Rapat Kerja tanggal 16 April turun jadi 42.461 orang, Rapat Dengar Pendapat tanggal 27 April 2020 turun lagi 39.426 orang, Rapat Kerja hari ini turun lagi 38.284 orang, ini orangnya kemana ini kalau sampai gajiannya itukan berbahaya ini Pak.

Dan saya minta soal standar biaya, standar biaya ini tolong Pak, saya minta saya sudah mencermati kalau saya ceritakan panjang. Tolong Bapak Irjen, Karo Perencanaan dan Kabag Perencanaan itu meneliti kembali, baik anggaran proyek atau yang dikontrakkan atau satuan-satuan yang ada. Karena untuk saat sekarang ini DPR RI juga membahas Satuan-3 jadi semua tanggungjawab di Kementerian alangkah baiknya disisir kembali oleh Bapak Irjen sama teman-teman sebenarnya ini layak tidak jangan sampai ada markup dan juga Eselon I sering melihatlah apa betul ini anggarannya. Kadang-kadang staf kita itu lalai atau sengaja itu bisa terjadi. Ini yang terjadi kalau sampai terjadi dikemudian hari resikonya panjang kepada Bapak Menteri. Ini sering terjadi seperti hari ini saya membaca di Tempo kan tidak enak kita membacanya, harga ayam dan harga babi. Itu mungkin ada kelalaian atau kurang ada rincianya yang perlu kita lanjutkan, kita perbaiki.

Yang terakhir Bapak Menteri, ini soal Bansos. Saya tidak tahu ini Kementerian Kehutanan mulai hari ini sudah mulai membagi kepada Anggota Komisi IV DPR RI, terus Kementerian Kelautan akan memberikan gemar makan ikan Anggota Komisi IV DPR RI itu 5-10 paket dapatnya, satu paket Rp50 juta. Di samping itu satu keluarga akan dibagi satu kilo ikan, itu membeli daripada masyarakat semua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Darori hanya meralat kalau Bapak bilang 1 kilo berarti itu orangnya tidak benar, jatahnya 2 kilo Pak. Ikan Nila dari pembudi daya lokal, karena besok diserahkan di Lampung.

Terima kasih.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Saya ikan bandeng Pak Ketua, jadi yang 2 kilo jadi 1 kilo presto.

**KETUA RAPAT:**

Oh gitu, ya bagus.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Itu maksud saya.

Terima kasih Ketua.

Yang terakhir Bapak Menteri, ini Bansosnya Kementerian Pertanian ditunggu-tunggu Pak. Alangkah baiknya misalkan, ini misalnya yang 1 juta ekor ayam itu jadi Bansos dibagikan kepada masyarakat satu KK satu ekor ayam itu sudah 4000 orang yang makan ayam Pak Menteri, misalnya gitu. Ini yang ditunggu-tunggu.

Jadi saya kira harapan kami ke depan Bapak Menteri, tolong hati-hati ini karena kalau seperti ini masalah anggaran itu muaranya itu tanggungjawab kepada Menteri dan juga Eselon I. Saya sudah pengalaman Pak, jangan sampai babak belur dipanggil-panggil itu. Saya berapa kali jadi saksi saja susah Pak, apalagi jadi tersangka gitu. Harapan teman-teman jangan sampai terjadi.

Demikian Ketua, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Kanjeng.

Selanjutnya Bapak Ketua Bapak Daniel Johan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):**

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua, Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kita cintai dan seluruh segenap Anggota,  
Bapak Menteri dan seluruh jajaran.

Saya ada dua hal penting saja Pak Menteri, yang satu penegasan apa yang sudah disampaikan oleh senior kita Bapak Darori. Bahwa saat ini petani lagi sangat sulit, produk-produk yang dihasilkan semuanya harganya anjlok. Jadi kita sangat berharap disini Bapak Menteri Kementerian Pertanian bisa menunjukkan perannya, membantu penyerapan dengan harga yang baik. Nah, penyerapan dengan harga yang baik itu bisa juga untuk memperkuat Bansos membantu masyarakat yang saat ini sedang kesulitan. Sebenarnya waktu periode yang lalu ada program yang sangat baik yang kita sebut dengan rumah pangan lestari. Dan kalau itu bisa masuk ke dalam program saat ini saya rasa itu bisa sangat membantu masyarakat baik petaninya maupun masyarakat yang saat ini lagi kesulitan karena banyak pembatasan-pembatasan.

Yang kedua, sehingga kami berharap realokasi itu benar-benar memikirkan kesejahteraan petani. Ini data terakhir yang kita dapatkan NTP pertanian itu drop, sangat drop jadi 5 bulan berturut-turut dari 104,16 sekarang di bulan April hanya menjadi 100,32. Kalau ini dibiarkan terus berarti anggaran yang besar di Menteri Pertanian akan menjadi sia-sia, karena kinerja utama dari Kementerian Pertanian minimal ada dua, yaitu meningkatkan NTP kesejahteraan petani dan yang kedua adalah memastikan meningkatnya produktifitas pertanian pangan. Jadi kami berharap realokasi di tengah wabah bencana saat ini benar-benar bisa mencapai 2 target itu di tingkatkan.

Demikian, terima kasih Bapak Ketua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Daniel.

Selanjutnya yang terhormat Bapak Kapoksi saya Bapak Sunarna.

Silakan.

**F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Ketua yang baik hati, sehat selalu,  
Bapak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang saya hormati dan saya banggakan.

Pak Menteri yang saya hormati, bahwa saya menyampaikan ada tiga hal terkait masalah produksi dan juga masalah kegiatan yang ada di negara kita khususnya dampak dari COVID. Pertama adalah bahwa produksi padi kita dari tahun ke tahun itu adalah kecenderungan menurun antara 2%-5%. Nah, kenapa Bapak Menteri tidak juga memperjuangkan dengan adanya penurunan ini, kesulitan di dalam masyarakat khususnya petani kita. Harga gabah kering pun bukan diperjuangkan harganya untuk naik, dulu harganya 45 sekarang 43. Nah, kenapa malah tidak dinaikkan jadi 5000, kan itu menjadi pemikiran bersama. Kalau mereka petaninya ini adalah penjualan harga gabahnya ini tercapai, harganya baik, saya pikir mereka bisa ... dan bantuan pun dari Bapak Menteri harus nyata dan harus jelas. Bahwa tidak main-main petani ini, ini masalahnya selalu menurun dalam tahun, setiap tahun, apalagi sekarang.

Terkait selanjutnya Bapak Menteri, bahwa perlulah kita sekarang ngotak-ngatik kita lihat anggaran dari Dirjen-Dirjen semuanya, tapi tidak ada master plan yang jelas, master plan dari ide gagasan Bapak Menteri bahwa

mau dibawa kemana semua kita ini adalah impor, kita kelihatan sekali di masa pandemic COVID-19. Loh, ini terasa sekali. Nah, tentunya master plan bisa di mulai dari sekarang Bapak Menteri. Bapak Menteri adalah seorang manajer yang harusnya bahwa anggaran-anggaran jelas sasarannya dan tujuannya dan kenaikannya. Jangan Bapak Menteri dengan pemberitaan statement-statement bahwa ekspor kita banyak, surplus, tapi mana yang mana barangnya, yang dari mana yang memang diekspor, padahal impornya terus menerus semuanya serba impor Bapak Menteri.

Bapak Menteri yang saya hormati dan saya banggakan.

Nah, kalau master plan pertanian ini untuk produksi pertanian ke depan kita akan kuat. Anak cucu kita mau ganti menteri, mau ganti siapa pun akan sama saja Pak Menteri, kesulitannya ya begini-begini terus. Jadi anggaran ada terus, tiap tahun ada terus triliunan tetapi sasarannya hanya mengambang dan sekedar angan-angan dan petani tetap sama, produksinya sama, harganya juga sama, dan mereka juga digencet barang-barang impor semua. Sekarang kita lihat gula saja di Jawa Tengah itu saja juga kondisinya juga masih mahal masih di atas Rp16 ribu. Jadi ini juga menjadi pemikiran Bapak Menteri.

Bapak Menteri yang saya hormati dan saya banggakan.

Terkait baru saya kemarin Pak Menteri, saya dukung untuk ATM Beras ini Pak, tapi mendukungnya juga bukan hanya untuk DKI Pak, mestinya seluruh Indonesia Pak, karena kalau ditanya saya juga tidak tahu ATM Beras itu apa nanti biar saya tahu, biasanya saya ATM Duit Pak, jadi saya ditanya tidak tahu. Nah, untuk ini juga perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, kalau bikin program negara kita ini Indonesia Pak, negara kita bukan DKI saja. Nah, perlu menjadi pemikiran Bapak Menteri bahwa kebijakan inii eksekutor itu Indonesia apalagi dalam kondisi sulit, kalau kondisi enak bolehlah Pak, mungkin sample percontohan. Nah, sekarang kondisi sulit mestinya kalau program tidak bisa menyeluruh ya tentu tidak usah dilaksanakan.

Terkait selanjutnya tambah satu lagi Pak Ketua, terkait dengan banyaknya sekarang impor bea masuknya nol, mau bawang, mau daging, mau bawang putih nol Pak. Tapi disini bahwa ada surat-surat dari Gaposido Pak Ketua, dari Gabungan Importir untuk sapi bakalan dan juga beberapa yang telah masuk Bapak Ketua bahwa mereka mengharapakan bea masuk untuk impor untuk sapi bakalan dan juga untuk kerbau ini juga bisa dinolkan Bapak Ketua. Karena impor-impor yang lain juga bea masuknya nol, tapi yang sapi bakalan dan lain-lain masih ada beberapa yang memag asih kena bea masuknya 5%.

Saya kira itu Bapak Ketua yang saya hormati dan saya banggakan.  
Bapak Menteri terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bapak Kapoksi yang terhormat yang tadi bicara masalah ATM Beras. Semoga di tempat Bapak nanti dapat ATM Beras.

Selanjutnya Mbak Alien Mus.

Silakan.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih Ketua dan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati dan banggakan,  
Dan tentunya Bapak Menteri beserta jajarannya.

*Alhamdulillah* kita sudah yang kesekian kali mengikuti rapat bersama dengan Kementerian Pertanian. Dan *Alhamdulillah* saya akan memberikan apresiasi kepada Dirjen PSP yang tadinya pupuk organik ada sekarang sudah tidak ada. Ada beberapa kegiatan yang saya lihat juga ada....

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ketua, mohon ijin suaranya kurang jelas.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Tes.

Baik, terima kasih sudah jelas Bapak Sekjen.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Sudah.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Baik, terima kasih.

Bapak Menteri, saya mau memberikan apresiasi kepada Dirjen PSP kemarin rapat minggu kemarin disampaikan oleh beberapa Anggota Komisi IV DPR RI bahwa pupuk cair organik itu tidak perlu dimasukkan dan saya melihat dianggarannya ini sudah tidak ada.

Terus permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hansi Lema soal ayam ini juga tidak ada volume dan satuannya tapi terdapat anggarannya. Ini juga perlu dipertanyakan, karena memang ini sudah yang kesekian kali saya berharap bahwa kita Komisi IV DPR RI dengan Kementan memiliki kepastian atau keputusan bersama terhadap prioritas anggaran dalam menghadapi COVID-19 ini terutama kepada para petani dan juga untuk kesejahteraannya dan juga pasca dan pra panen. Karena memang kita dihadapi dengan bulan 4, 5, 6, 7, 8 adalah masa panen bagi petani tapi memang sudah diketahui bersama bahwa hasil panen yang sudah ada pun tidak ada daya beli atau turunnya atau anjloknya harga hasil panen.

Terus kita juga diperhadapkan dengan atensi kemarau panjang, ini juga menjadi atensi buat kita. Transparansi anggaran yang seperti kemarin kita ketahui, kami Komisi IV DPR RI sudah memiliki acuan untuk penganggaran di setiap Setjen yang saya pikir sudah bisa kita lihat bersama ada pengurangan, ada kenaikan tapi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kami sebagai Anggota Komisi IV DPR RI.

Beberapa waktu yang lalu juga kami meminta bahwa diharapkan kepada Kementan memberikan atau draft kontrak yang sudah dilakukan kepada pihak ketiga karena ada kegiatan-kegiatan yang belum disepakati bersama Komisi IV DPR RI tetapi kemungkinan besar kegiatan tersebut telah dilakukan. Tadi juga sudah sempat disinggung.

Terus saya juga ingin menyampaikan Bapak Menteri, kebetulan hari ini kita bisa bersama dengan Bapak Menteri karena beberapa rapat waktu yang lalu kita bersama Eselon I banyak hal-hal kegiatan yang tidak sesuai dengan Tupoksinya dan juga di luar daripada Tupoksi dan tidak tepat sasaran bagi para petani. Mohon dengan sangat saya meminta kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI kita menjadikan acuan rapat kita dari rapat pertama sampai hari ini sebagai hasil keputusan kita bersama dengan Kementan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara Komisi IV DPR RI dengan Kementan dibidang ada satu dan lain hal, ada salah satu Anggota yang memiliki ini, memiliki itu. Kita mohon dengan sangat pada saat ini kita memiliki transparansi dan niat itikad yang baik untuk tanggungjawab kita bersama terhadap petani dan buruh tani.

Saya berharap tadi yang sudah disinggung oleh beberapa senior saya tentang pupuk cair organic kalau sudah tidak ada lagi dalam anggaran yang sudah diberikan oleh Kementan terhadap kita jangan lagi kita mulai lagi dari awal. Karena ini juga merupakan hasil dari rapat kita dan keputusan kita bersama dan sudah ditandatangani oleh Pimpinan Komisi dan juga Setjen. Jadi kita focus dengan apa yang sudah kita rapatkan berhari-hari, jangan sampai kita balik lagi dari awal dan kita sisir lagi satu per satu per Eselon I.

Saya harap seperti itu Bapak Ketua, agar kita ini minggu depan kita sudah pada waktu Reses jadi ini kita punya waktu masih 4 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa focus dan betul-betul anggaran kita memang tepat sasaran dan transparansinya penggunaan anggaran pun juga sama. Karena kita tidak bisa lagi sentuh Satuan 3, maka dari itu kami harapkan kesepakatan yang

dilakukan oleh Komisi IV DPR RI dan Kementan memang betul-betul tidak ada lagi kebohongan.

Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan.

Selamat berpuasa.

**KETUA RAPAT:**

Mbak Alien, kita memang tidak membahas Satuan 3 tapi kita wajib memiliki Satuan 3 sebagai fungsi pengawasan.

Selanjutnya Mbak Riezky Aprilia.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Oke.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat sore Bapak Menteri beserta jajarannya.

Saya pada dasarnya berterima kasih atas agenda hari ini yang sudah terealisasi sesuai dengan jadwal yang sudah ada beberapa berita mulai dari 21 April 2020 di Detik, di Kompas tanggal 25 Maret 2020 juga ada, 13 April 2020 juga terkait permintaan Bapak Jokowi untuk memastikan ketersediaan pangan ini harus benar-benar menjadi atensi kita.

Seperti di rapat pertama saya sampaikan bahwa apabila memang terjadi realokasi ini adalah kegagalan kita bersama untuk menjelaskan kepada Bapak Presiden berarti, bahwa pertanian ini adalah sector garda terdepan Bapak Menteri. Saya mohon kedepannya mungkin ada solusi terkait hari ini, karena pasca pandemik ini banyak hal yang menjadi pekerjaan kita bersama. Dan saya harap kedepannya seluruh Dirjen dalam menyusun anggaran ini harus mempersiapkan mid strategy dan juga long strategy. Jadi saya mungkin beserta kepada teman-teman Komisi IV DPR RI lainnya juga tidak berharap ada pembahasan panjang lagi terkait hal-hal yang dirasa belum mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini.

Dan kemudian sedikit saya ingin menyampaikan juga terkait masalah situasi petani hari ini, karena Kalimantan dan Sumatera itu mayoritas masih banyak karet, saya ingin sekedar mengingatkan bahwa sebelum pandemic ini harga karet itu sudah hancur dan petani itu sudah krisis apalagi dengan kondisi hari ini terbatasnya PSBB dan segala macam pokoknya di semua daerah ini, ini akan mempersulit mereka. Saya mohon solusinya dari Kementan, terutama itu kaitannya mungkin dengan Dirjen BUN.

Dan kemudian saya ingin minta jawaban langsung mungkin ini Pak, ini saya ingin mengonfirmasi terkait berita apa betul bahwa Kementan sedang ada agenda untuk membuka lahan gambut dan menanam benih padi di atasnya. Saya mohon apakah betul ada ini, saya mohon konfirmasi langsung

karena saya baru mendapatkan informasi ini. Apakah betul itu Pak, ada agenda untuk menanam benih padi, mohon Bapak Sekjen atau Bapak Menteri.

**KETUA RAPAT:**

Pak, tolong dijawab pakai speaker biar bisa direkam.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Tolong dijawab saya kurang mendengar Pak.

**KETUA RAPAT:**

Pak Sekjen atau PSP atau siapa yang menjawab, yang teknis ini masalah teknis.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Saya mendapat informasi Bapak-bapak bahwa Pemerintah akan membiuka lahan gambut dengan benih padi ditanam disitu, apakah betul atau tidak Pak, saya mohon konfirmasi Bapak Sekjen mungkin atau Bapak Menteri langsung.

**MENTERI PERTANIAN:**

Jadi kalau itu Pimpinan dan segena Anggota Komisi IV DPR RI, dalam rangka mengikuti atau mengorientasikan pikiran Bapak Presiden menghadapi kekeringan yang di-warning oleh FAO dan kemungkinan krisis pangan setelah COVID, maka Presiden kita mempersiapkan langkah lanjut yang kemungkinan terkait dengan ekstensifikasi pertanian. Jadi itu belum ada anggarannya, belum dipersiapkan seperti apa. Yang jelas kami dipersiapkan untuk membuat perencanaan menghadapi kekeringan yang menjadi warning itu. Oleh karena itu, ada kurang lebih 400 lahan rawa dan rawa gambut yang dipersiapkan, sekarang ini sementara tidak ada, kemudian ada 200 lahan lainnya lahan kering, oleh karena itu kurang lebih 600 yang dipersiapkan. Ini tentu pada saatnya akan diajukan anggaran kepada Menko dan dalam pembahasan di Menko dan terkait juga Menteri Keuangan dan ini hasil Ratas seperti itu.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Menteri.

Berarti memang betul ada agenda tersebut baru wacana ya Pak ya, berarti wacana untuk bicara long term.

**MENTERI PERTANIAN:**

Karena ini belum ada anggarannya, karena ini belum menjadi sebuah keputusan yang pasti, belum kami sampaikan secara langsung kepada DPR RI, karena ini belum menjadi sebuah keputusan.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Oke, saya hanya mau memastikan itu saja Pak, karena kan jangan sampai nanti menjadi perdebatan.

**MENTERI PERTANIAN:**

Kami pasti akan laporkan kalau sudah ada.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Baik Pak, terima kasih banyak.

Jadi konfirmasi itu berarti memang ada agenda tersebut dalam arti katra belum fix hari ini tetapi ini mungkin bagian dari strategi jangka panjang yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden kan melalui Kementerian terkait. Oke, itu saja.

Saya sekali lagi mengucapkan yang pasti semoga kita bisa bekerja sama lebih baik lagi kedepannya Bapak Menteri. Saya harap dengan seluruh Dirjen dan Sekjen juga agar anggaran ini lebih tertata rapi dan lebih baik kedepannya berpihak kepada petani karena sector pertanian adalah garda terdepan di Indonesia hari ini.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Mbak Kiki.

Bapak Menteri, saya ini kadang bingung malam saya pulang tidak bisa tidur, saya minta data benih dengan Eselon I sampai hari ini datanya tidak ada, tidak pernah dikasih. Bagaimana kita mau nanam kalau data benih saja tidak ada. Sampai saya ditanya oleh Pimpinan Fraksi saya, saya harus menjawab apa. Kalau saya jawab asal-asalan nanti saya salah, saya maunya data yang valid, tanya Bapak Wandu sudah berapa minggu yang lalu saya tanyakan. Minta tolong data benih melalui staf ahli saya, jawabannya ada ini belum dapat jawaban dari Direktur Benih. Apa Eselon I memerintahkan Eselon II harus jalan pada saat itu juga. Ini loh Bapak Menteri, Bapak Menteri saya ingatkan Bapak Menteri jangan mau direpotkan oleh badan maupun

Eselon I. Mereka mau enak saja, mau anggaran sebesar-besarnya, dan anggarannya tersebut juga tidak jelas, nanti saya bisa bedah satu-satu kalau memang diperlukan.

Masih ada perjalanan dinas keluar negeri, sudahilah para Eselon I, Kepala Badan, dukunglah Menteri yang baik ini bekerja. Bekerjalah yang baik demi rakyat, demi bangsa, demi negara, jangan demi kelompok. Ini juga saya terima data bahwa kemarin ada Rakortas dilaporkan Agustus 2020 Kementerian Pertanian mengklaim kalau tidak salah surplus 8 juta ton, kemudian Februari 2021 surplus 1,8 juta ton. Kita harus ingat jangan Dirjen TP sama PSP ngomong selalu satu hektar menghasilkan 6 ton sampai 7 ton, tapi tidak dihitung kalau yang panennya 3 ton, tidak dihitung yang Puso, tidak dihitung yang kebanjiran, tidak dihitung yang kena hama tikus, kena wereng, ini tidak pokoknya laporannya baik-baik saja, yang penting peningkatan produksi. Sekarang kalau ditanya barangnya dimana, kan bingung jawabnya. Tolong sekali lagi saya minta tolong para Eselon I berikan data yang terbaik, berikan data yang benar kepada Menteri, karena yang bertanggungjawab di Kementerian Pertanian namanya Bapak Syahrul Yasin Limpo bukan dirjen, bukan kepala badan. Kalau ada apa-apa yang dimarahin oleh Presiden siapa, ya beliau. Ini loh, datanya salah pasti semuanya salah, karena tidak mungkin seorang menteri buka-buka nyari data kesana-kesini tidak mungkin, menteri itu hanya menerima data dan melaporkan kepada Presiden.

Ini sampai hari ini saya belum mendapatkan data benih. Bagaimana kita mau bicara masalah surplus, bagaimana masalah kedaulatan pangan, data benih saja kagak ada. Jadi kalau kita lihat Bapak Menteri ini, apa yang sudah di Rapat Dengar Pendapat tapi tetap juga para Eselon I dan Badan merubah juga, padahal ini sudah kesepakatan bersama kalau begini kan hal yang tidak baik. Mereka selalu berlindung bilang tidak cukup biaya, asal tahu saja Bapak Menteri Komisi IV DPR RI dapat anggaran Rp23 miliar untuk 1 tahun menyelenggarakan rapat-rapat termasuk Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, kunjungan spesifik dan lain-lain. Hari ini kami dipotong Rp13 miliar, sisa uang kami untuk perjalanan dinas hanya Rp4,2 miliar. Ini masih waktunya 7 bulan, kami tidak mengeluh, kami tetap berjalan. Coba nanti kalau kita bedah satu per satu, dan kemarin sudah dijelaskan kepada Bapak Sekjen, bahwa setiap keputusan Rapat Dengar Pendapat, Rapat Kerja langsung saya kirimkan ke BPK dan Bappenas. Termasuk juga nanti Satuan 3 saya minta akan saya laporkan kepada mereka, karena saya tidak mau terjadi masalah yang tidak baik.

Demikian, selanjutnya....

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):**

Ijin Pimpinan, tadi saya terputus.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Pertanian untuk menyampaikan jawabannya, nanti Mbak Luluk tunggu.

## **MENTERI PERTANIAN:**

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang saya banggakan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya pertama ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Pimpinan. Ada kurang lebih 19 Anggota yang telah memberikan tanggapan dan beberapa masukan sekaligus pertanyaan. Mulai dari Bapak Dedi, Ibu Luluk, Bapak Johan, Bapak Khalid, Bapak Suhardi Duka, Ibu Endang, Bapak Kayai Hasan, Bapak Muslimin, Bapak Andi Akmal, Bapak Slamet, Bapak Hansi Lema dan Bapak Sutrisno, kemudian Bapak Hermanto, Bapak Bagus, mohon ijin saya panggil singkat-singkat saja Bapak Darori, Bapak Daniel, Bapak Sunarna, Mbak Alien dan Ibu Riezky.

Masukan ini sangat berarti dan saya tidak basa-basi untuk mengatakan akan saya jadikan perhatian yang serius dan kemudian dari hasil Rapat Kerja ini saya akan coba lakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Saya akan menjawab secara umum apa yang ada, dan yang agak teknis Bapak Sekjen saja yang mewakili Dirjen-Dirjen yang lain kalau itu Pimpinan ijin. Dengan demikian, maka secara umum akan kita berikan jawaban dan yang menjadi catatan-catatan khusus kita akan sempurnakan lagi Bapak Pimpinan, walaupun tentu saja diluar forum yang menjadi forum teknis.

Saya pertama ingin menjelaskan tentang apakah ada yang berbeda data Menteri Pertanian dengan Bapak Presiden atau apakah data Bapak Presiden berbeda dengan data pertanian. Jawaban saya Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI, "tidak Bapak". Data yang dipegang oleh Bapak Presiden, data yang dipegang oleh Menteri Pertanian adalah satu data itu dari BPS. Jadi yang saya sampaikan tentang seperti apa produktifitas pertanian khususnya beras dan 11 bahan pokok dasar yang ada itu termasuk didalamnya over stock yang ada dan carry over dari satu bulan ke bulan yang lainnya adalah data yang sudah divalidasi oleh BPS. Oleh karena itu, data yang ada di Presiden adalah data dari BPS.

Kemudian saya ingin mempertegas dalam forum yang tentu saya terbatas ini, bahwa defisit daerah-daerah atau provinsi yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah data yang kami Menteri Pertanian yang memberikan kepada beliau. Sehari sebelum Ratas pun beliau menelpon saya dan bicara tentang validasi terhadap data itu. Saya bilang data itu adalah data BPS, namun demikian data riil laporan dinas-dinas teknis dari seluruh kabupaten kota juga masuk secara manual, secara biasa, dan kemudian data virtual kita melalui vcon yang ada pada seluruh gubernur dan para bupati juga sudah dilakukan, kemudian dilakukan quick count untuk menyelesaikan itu. Oleh karena itu, kami jamin persis Bapak, saya tidak membohongi Presiden. Dan Presiden betul-betul menggunakan data yang ada. Kalau kemudian Presiden menetapkan dimana daerah defisit itu sesuai masukan dari Kementerian Pertanian tidak ada lagi warning bagi semua yang terkait dalam distribusi dan transportasi, dimana penegasan dari Ratas itu Bapak Presiden memintakan semua pihak membantu agar tidak ada sumbatan distribusi dari bentuk-

bentuk wilayah PSBB atau sebagai pada masalah-masalah yang ada di 11 komoditi itu Pimpinan. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada masalah di pendekatan kita.

Kalau begitu saya akan tampilkan peta beras kita, saya coba sedikit singkat-singkat Ketua. Nah, ini peta beras sebelum ini ada sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden ada beberapa daerah, ada 7 provinsi yang defisit. Setelah kita intervensi maka yang tersisa adalah Riau, Kepri, Babel, dan Maluku Utara, itu setelah kita intervensi.

Next, ini minyak goreng sudah tidak ada masalah. Next, kemudian kami kira seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, maka cabai merah misalnya saja yang ada dari Jogjakarta atau Jawa Tengah itu arahnya ke Jambi, Sumatera Barat, seperti apa yang disampaikan. Kemudian ada data yang biru itu ke Kalimantan, ada data dari Jawa Timur, karena ini cabai merah .... Memasuki Nusa Tenggara Timur. Kemudian dari Sulawesi Selatan akan menutup Papua. Kita sudah gambarkan data ini kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden inilah yang dipakai sebagai bagian-bagian itu.

Next, demikian cabai rawit Bapak. Next, dan ini bawang merah yang kita lihat yang banyak. Bapak Presiden bahkan berpesan juga bawang merah ini harus menjadi kekuatan kita sehingga ini peta distribusi. Jadi sebenarnya data yang dipegang oleh Presiden itu adalah data Kementan dan data yang kami sampaikan kepada public terhadap stock-stock kita semuanya adalah BPS. Dan hari ini BPS sudah mengklarifikasi terhadap data yang ada itu. Lanjut, saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Telur ayam juga seperti ini karena ini banyak juga disoroti seperti itu, tapi ini semua yang kami serahkan Pak.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Kemudian ada juga yang berkait dengan data berbeda tadi, bagaimana kenapa BUMN diberikan tugas untuk ikut menangani pangan. Ini semua terkait denganantisipasi kekeringan yang sudah di-warning oleh FAO yang juga dari FAO hari ini saya ngirim surat untuk memperjelas warning itu seperti apa teknisnya. Bahkan saya minta kalau memang ada warning seperti itu mungkin ada advice dari FAO kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, keterlibatan BUMN dalam penegasan Ratas itu juga masukan dari kami Pak, kenapa? Begitu banyak BUMN, PTPN, dan berbagai BUMN lain yang memiliki lahan-lahan yang tidak terpakai sementara ada warning bahwa akan ada kekeringan. Oleh karena itu, kita akan gunakan lahan-lahan itu bersama BUMN agar lahanya yang belum ditanami perkebunan misalnya PTP misalnya itu bisa diintervensi dengan jagung dan lain-lain sebagainya. Dan MoU-nya sementara kami buat, ada dua kemungkinannya ini masuk dalam strategi kita yang 600 hektar itu ataukah ini diluar dari itu untuk memperkuat. Bahkan lahan-lahan kehutanan yang tidak dipakai atau lahan marginal kehutanan yang bisa digunakan untuk tanaman pangan itupun masuk dalam diskusi Bapak Presiden, tapi kendali orientasi teknisnya tetap diserahkan ke dalam domain pertanian, seperti itu Pak.

Kalau begitu dari apa yang ada memang ini ingin saya pertegas bahwa yang paling utama adalah distribusi. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh beberapa Anggota Komisi IV DPR RI yang lain bahwa tugas kami yang paling utama adalah produktifitas. Tugas yang berkaitan dengan stabilisasi harga antara permintaan dan ketersediaan sebenarnya adalah tugas perdagangan, bagaimana penyerapan adalah Bulog. Kami ijin Ketua, Pimpinan yang saya muliakan, Anggota Komisi IV DPR RI, kalau kita tunggu ini semua tanpa desakan, tanpa gerakan kita bahkan tanpa pancingan kita, maka kemungkinan ada juga sangat anomaly dan susah dikendalikan. Biasanya memang awal-awal puasa atau Ramadhan harga memang naik, dinamikanya seperti itu dan sesudah minggu pertama dia turun, tapi sekarang agak lain mungkin karena ada COVID mau tidak mau PSBB, kemudian lock wilayah, penutupan desa, dan ada daerah-daerah yang tidak dimasuki desa termasuk membagikan bibit tidak boleh dengan truk, dengan ambulance itu terjadi Pak, dilapangan. Dan ini bagi Kementan tidak mudah, oleh karena itu saya selalu jalan ke daerah untuk bersama-sama Polri dan TNI ini juga harus memperkuat itu.

Harga dilapangan rendah tetapi harga di pasar naik, ini juga membuat kita yang agak lain dalam hitung-hitungan standar. Dimana ketersediaan cukup, stock cukup, sementara harga kok naik di atas mestinya kan harga turun. Ada beberapa dan ini yang disampaikan oleh BIN bahkan Badan Inteligent kita nasional mengatakan bahwa kenaikan itu tiba-tiba dipicu satu minggu terakhir atau satu dua terakhir ini pembelian beras untuk kegiatan sosial kurang lebih 500 ribu ton. Ini bukan data Kementerian Pertanian, ini data BIN disampaikan di dalam Ratas. Jadi ada seperti itu kejutan-kejutan yang sangat anomaly. Jadi memang ada hal-hal yang menjadi tantangan-tantangan tersendiri, kita tetap mengatakan harus kita siap untuk melakukan intervensi bagi apa yang akan dilakukan.

Kemudian besok ada Rakor Menko Ekuin yang berkaitan dengan persiapan Kementan di dalam mengintervensi perkiraan musim kekeringan yang ada bersama dengan warning FAO yang ada besok. Salah satu yang akan kita usulkan adalah karena ini belum terjadi mudah-mudahan bukan janji. Saya sementara berupaya mengusulkan 600 ribu hektar tambahan dari eksisting yang ada, karena musim tanam kedua kita sesudah panen raya ini harus kita percepat dengan apa yang ada, tapi sekaligus mempersiapkan langkah selanjutnya masuk pada persiapan 600 ribu hektar. Kalau kekeringan itu sangat besar, maka yang masih punya sisa air yang cukup adalah dalam lahan rawa yang ada. Dan lahan rawa itu ada dalam deteksi kita sebenarnya kurang lebih 1 juta hektar yang akan bisa digunakan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini bisa mendesak agar pemotongan dana kita yang kurang lebih Rp7 triliun itu bisa menjadi bagian-bagian yang besok bisa memulihkan aktifitas yang mestinya harus kita lakukan.

Kemudian yang ketiga, pemotongan bagi Kementerian Pertanian yang tadinya Rp3,4 triliun kemudian menjadi Rp7 triliun ini juga mengejutkan kita dan surat, kan Kementerian tidak biasanya bersurat langsung ke Presiden biasanya ke Menko dan tekbusan ke Setneg dan Setneg memberikan ruang kalau itu. Ini saya buat dua surat untuk mengatakan ya bukan mengcomplain

tetapi menyatakan pentingnya pertanian di saat seperti ini, bahkan secara jelas saya katakan mensolusi COVID tidak hanya mental solution tapi food security akan jauh lebih berperaan. Bahkan mental solution bisa selesai dalam dua bulan, tiga bulan kedepan tapi masalah perut dan ekonomi masih bersoal setahun dua kedepan. Oleh karena itu, kami mohon dipulihkan anggaran yang ada. Sudah seperti itu Pak, tetapi dalam Ratas ini yang dikatakan terakhir kepada saya bahwa semua Kementerian dipotong. Dan kalau dilihat kementerian dipotong hampir diratakan, sesuai dengan proporsi yang ada. Bahkan Menteri Perhubungan dipotong Rp10 triliun katakanlah seperti itu contohnya.

Tetapi ada pernyataan Bapak Presiden dalam Ratas, "Mentan lakukan semaksimal apa yang ada, kamu usulkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan berikutnya". Sekaligus dalam forum ini saya laporkan mohon ijin Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI kami lagi menyusun program untuk itu, khusus untuk masalah kekeringan ini. oleh karena itu, apakah tidak diperjuangkan pemotongan itu, luar biasa Bapak saya menghadap kemana saja, bahkan saya menghadap ke Luhut, semua Menko saya hadapi untuk menyatakan ini harus bisa dipertimbangkan.

Kalau demikian adakah provinsi yang defisit dalam negara yang besar, sehingga pasti apa saja komoditi itu pasti ada defisit, ada yang sentral produksinya. Ada daerah-daerah sentral yang ada, tetapi bagaimana menyikapi yang saya selalu kemukakan adalah surplus dalam neraca pangan nasional. Kemudian neraca yang kemudian ada daerah defisit disitulah peranan-peranan kita melakukan distribusi dan penutupan yang ada. Kurang lebih seperti itu, memang ini masih memerlukan langkah yang lebih konkrit kedepan akan tetapi pada dasarnya itulah yang kurang lebih yang bisa saya jelaskan menyangkut secara umum *policy* yang ada.

Saya berharap kedepan saya masih membutuhkan kawalan yang sangat ketat dari Pimpinan khususnya dan Anggota Komisi IV DPR RI apalagi yang harus kita lakukan bersama. Saya masih yakin bahwa produktifitas yang ada dari hasil validasi yang dilakukan BPS, karena sebenarnya lebih tinggi kita dari BPS secara dini. Kemudian Menteri ATR juga sudah membenarkan dari semua dari lahan yang sudah ada, pencitraan satelit melalui AWR dalam arti vision ...hitungan yang juga cukup tetapi menghadapi anomaly cuaca yang kemungkinan panasnya akan datang seperti dulu tetap persiapannya kita harus lakukan lebih banyak.

Konsetrasi Kementerian Pertanian tetap pada produktifitas. Kalau ada sedikit kita melakukan upaya-upaya yang lebih extra ordinary dari yang ada hanya untuk memperlihatkan bahwa kita ada untuk tetap diperhitungkan oleh yang lain. Kurang lebih seperti itu Pimpinan dan saya berharap Bapak Sekjen akan menjelaskan masalah-masalah teknis yang ada.

Saya terakhir, ini hitungan dari Litbang Bapak, yang saya pakai juga adalah ini untuk bisa mencegah virus corona yang ada ini sudah dilakukan uji klinik dari Litbang kita oleh beberapa peneliti virus kita yang cukup bagus, yang selama ini biasa dipakai oleh penangkal bio serangan teroris yang ada

dan kelihatannya ini bagus pencegahan cukup bagus. Dan mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa kita perlihatkan kepada yang lain, tapi uji cobanya akan segera saya kirim kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI kalau berkenan.

Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Sekjen.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Sekjen, saya minta penjelasannya jangan terlalu lama karena waktunya kan nanti mau Sholat dan buka puasa. Secara singkat yang focus-fokus saja, satu pertanyaan bagi saya yang penting apakah hasil Rapat Dengar Pendapat mau dirubah lagi, karena dari pengajuan inikan ada perubahan ini. Jadi kalau Sekjen tetap ngotot ada perubahan, lain kali kita tidak usah ada Rapat Dengar Pendapat, itu saja saran saya. Jadi nanti kita cari jalan terbaik.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mohon ijin Bapak Menteri.

Yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Pertama, terkait dengan realokasi anggaran kami menghitung berdasarkan sisa anggaran yang bisa dihemat yang telah memperhitungkan realisasi per tanggal 4 Mei 2020. Kemudian kami melakukan simulasi memang yang menjadi perhatian terutama BPSDMP dan Badan Litbang Pertanian. Berdasarkan hasil simulasi kami, bahwa sisa anggaran BPSDMP ini ada Rp382 miliar sedangkan hasil dari Rapat Dengar Pendapat ini pemotongan 430, sehingga hitung-hitungan kami minus Rp47 miliar.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Sekjen, saya potong sebentar. Kalau anda katakan minus kasih saya datanya sekarang, tunjukkan. Tidak mungkin dalam waktu sekejap sampai Rp1 triliun belanja, tidak mungkin, kita taruhan berapa sama saya. Kemarin sudah ada kesepakatan, sudah ada Rapat Dengar Pendapat, sudah diputuskan, sudah tandatangan, cobalah.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Bapak Ketua, mohon ijin pada Rapat Dengar Pendapat juga ada point 4E, manakala pemotongan tersebut diatas melebihi dari sisa anggaran.

**KETUA RAPAT:**

Itu saya yang masukkan untuk memberikan kelonggaran, bukan Sekjen yang diminta tapi saya Pimpinan Komisi IV DPR RI atas persetujuan

Anggota memasukan kata-kata itu. Tetapi hal ini jangan dimanfaatkan dong, jangan dimanfaatkan untuk memulihkan kembali. Coba pikirkan tadi Bapak Menteri ngomong apa, kalau hasil produksinya bagus kemudian musim hujan ngeringinnya pakai apa, beli matahari. Jadi realokasi anggaran tadi yang kami mau itu diberikan mesin pengering yang mini supaya setiap Gapoktan dapat. Sekarang saya cek ke Bulog begitu mendengar Bulog tidak beli gabah saya telepon, "kenapa anda tidak beli gabah?" "bagaimana mau dibeli Pak Ketua, kadar airnya 30%". Gimana mau beli, kalau dibeli ditimbun pasti berjamur dengan 30%. Solusinya apa? Ya Kementerian Pertanian yang memproduksi membantu peralatannya. Dari acara awal pembukaan tadi saya sudah ngomong saya sama teman-teman Pimpinan sama Kapoksi berharap Kementerian Pertanian membantu dryer. Tidak usah yang wah, tidak usah yang apa, cukup yang kecil saja, ini yang saya inginkan. Jadi kalau bicara kontrak atau apa, mohon maaf Bapak Sekjen saya ngurus perusahaan sekian puluh tahun setiap kontrak pasti ada addendum, apalagi di Kementerian gini.

Jadi kalau Bapak Sekjen bertahan seperti ini saya juga bisa bertahan, gitu saja atau kita cari jalan tengah. Rapat Dengar Pendapatnya nanti kita kurangi pematongannya.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Boleh sedikit saja.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Saya kasih contoh BPSDMP, bukan kontrak sebetulnya BPSDMP itu permasalahannya adalah pertama honor dan BOP penyuluh pertanian 402 juta itu kan tidak bisa dipotong Pak Ketua. Gaji pegawai itu BPSDMP Rp160 miliar, operasional perkantoran Rp84,59 miliar dan uang makan siswa dan mahasiswa, kami ada mahasiswa se-Indonesia itu sekitar 67 ribu, itu sekitar Rp53 miliar juga ada beasiswa mahasiswa S2, S3 yang kalau dipotong tidak bisa meneruskan S2, S3. Nah, ini total data dari Birocan dan BPSDMP itu untuk yang belanja yang tidak bisa dipotong sekitar Rp718 miliar. Ini mohon ijin Bapak Ketua, jadi kami sudah melakukan solusi mohon arahan dan masukan dari Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Yang lain silakan ada pertanyaan tadi dari teman-teman.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Baik, itu point yang pertama.

Point kedua....

**KETUA RAPAT:**

Nanti kita lihat saja kesimpulan rapatnya apa.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Harga ayam dan harga babi, mohon ijin saya mewakili Dirjen Peternakan. Memang kesan yang pertama itu harga 35 ribu ekor harganya Rp26,96 miliar tapi setelah Biro Perencanaan menelusuri ternyata itu terdiri dari beberapa komponen Bapak Ketua. Ada untuk pengadaan ayam lokalnya sendiri itu nilainya Rp2,02 miliar sebetulnya pemahamannya paket. Jadi 35 ribu paket karena harganya di setiap provinsi termasuk didalamnya ada pakan atau obat-obatan, ada bantuan biaya perbaikan kandang dan operasional. Kemudian selain masalah pengadaan ayam, juga memang ada terkait dengan hibah ayam dari UPT Rp23,9 miliar dan ini ada tunda bayar ini yang nanti akan saya pelajari.

**KETUA RAPAT:**

Pak Sekjen, kemarin bahan kemarin itu tidak ada kata-kata ini. Inikan seolah-olah Rp26 miliar tidak boleh kurang, apapun harus dilakukan, kan itu ini. Cobalah kok seolah-olah Kementerian Pertanian ini seperti orang sekolah yang tidak pintar. Padahal semua yang di Kementerian Pertanian itu pejabatnya pintar yang tidak ada cuman S7, semua pintar disana. Tetapi masa begini saja setiap Rapat Dengar Pendapat berubah, tiga kali Rapat Dengar Pendapat tiga kali berubah. Jadi seolah-olah Rp26 miliar ini dipaksakan, "gue gak mau tahulah yang penting angka ini masuk nanti baru buat lagi yang lain, ngarang bebas dah", inikan jadi tidak benar.

Heboh diluaran harga ayam 770 ribu yang jelek siapa, yang namanya kurang bagus siapa? Bapak Menteri bukan Eselon I. Eselon I nya kalau ditanya tidak mau jawab, tapi giliran sama wartawan menjawab. Ini loh yang saya tidak habis pikir, sekarang pengusaha ternak besar wajib membeli 1 juta, 1 juta ekor, mereka mau beli orang ayam mereka saja tidak keluar. Cobalah pikirkan ini, kasih saya pehaman karena saya sekolahnya tidak sampai S3, S1 pun sudah *Alhamdulillah* saya, makanya jangan dipaksakan kalau tidak bisa ya sudah hilangkan saja pogramnya, inikan dipaksakan. Melanggar aturan tidak yang kekurangan bayar 2019 saya tanya secara anggaran.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Baik Bapak Ketua, nanti saya akan cek terutama yang tunda bayar ini, karena kami akan pelajari dulu. Nanti saya akan cek dulu Pak.

**KETUA RAPAT:**

Terus saya tanya lagi harga babi Rp9 juta.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Untuk harga babi ternyata ini ada dua wilayah, untuk pengadaan tenak babi di wilayah Papua satu paket ini Rp13 juta. Harga ternak babi dan distribusinya Rp10 juta, ada pakan Rp2,16 juta dan biaya pembuatan kandang Rp100 ribu per ekor dan operasional ini sekitar Rp800 ribu. Tetapi untuk pengadaan ternak babi di wilayah non Papua, harga ternak babi dan distribusinya hanya Rp3 juta, pakannya sebanyak 120 kilo ini Rp970 ribu selama 2 bulan, ada pembuatan kandang dan operasional. Jadi ini Rp9 juta ini sebetulnya paket dan ada yang di wilayah yang berbeda. Mungkin nanti kedepan bahasanya bukan ekor ini paket Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Momon ini semula 550 ekor, tiba-tiba jadi 1000. Kami tidak mempermasalahkan mungkin ada Anggota yang meminta tambahan kuotanya tidak masalah. Cuman disini 1 ekor babi Rp9 juta, itu babinya saya rasa tidak perlu ditenak dikasih bantuan langsung dijual, dipotong sudah cukup, tidak usah ada peternakan babi lagi. Saya minta tolong dikoreksi.

Kemudian ada satu lagi yang agak menarik, halaman 24 dari Dirjen Peternakan. Norma standar pedoman dan kriteria Direktorat Teknis, volumennya Rp45 miliar lebih. Saya tidak mengerti ini, saya sudah tanya ke Direktur yang lain kok ada begini, apa ini. Manajemen Perkantoran termasuk prasarana pencegahan COVID-19 dan paket bantuan. Ini bantuan apa senilai Rp81 miliar, 57 volume Rp81 miliar yang awalnya Rp90 miliar turun jadi Rp81 miliar. Tolonglah negara ini dalam keadaan duka, kita semua kena musibah maka kita harus tetap bersama.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, nanti kami minta masukan untuk Ditjen Peternakan tapi arahan yang realokasi anggaran untuk ternak potong sudah saya kawal dan sudah dilaksanakan kembali, nanti yang lainnya kami akan lihat lagi.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Sekjen, Bapak sebagai leader disana seharusnya kasih tahu itu Eselon I termasuk Kepala Badan, kalau mau rapat punya bahan dibaca. Jadi waktu ada pertanyaan, ada diskusi dapat dijawab. Jangan sampai nanti ada Eselon I bertanya bahannya dari mana Pak, halaman berapa Pak, inikan sangat tidak benar. Tadi saya sudah jelaskan Bapak Kasdi tadi berbicara dengan saya, saya jelaskan Bapak Kasdi ini dan ini, tolong. Saya juga tadi diskusi dengan Bapak Kasdi dengan tertawa, dengan tersenyum, apa keluhannya Pak, Eselon I sama-sama. Cuman kalau caranya semua maunya Eselon I merubah Rapat Dengar Pendapat kemarin saya tidak sanggup, karena saya juga harus bertanggungjawab terhadap Pimpinan lain, Kapoksi dan Anggota.

Jadi harapan saya yang penting bagaimana produksi pangan kita meningkat, agar informasi atau ramalan dari luar bahwa mengatakan dunia termasuk kita akan krisis pangan. Ini saya berharap jangan sampai terjadi di negara kita.

Silakan kalau ada yang mau dilanjutkan kembali.

#### **SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Untuk Bapak Darori terkait dengan jumlah penyuluh yang menurun, memang kondisi saat ini berdasarkan update data terakhir PNS ada 26.410 sedangkan PTT Penyuluh sekitar 11.874. penurunan biasanya terjadi karena pensiun, karena totally itu penyuluh PNS dan ... Itu meninggal dunia dan mengundurkan diri. Data yang tadi saya sebutkan menggunakan data terakhir sesuai dengan update data.

Selanjutnya terkait hortikultura ini Bapak Hansi Lema, Bapak Sutrisno, Ibu Endang, Bapak Suhardi Duka, bawang merah tidak dihapus tetapi tetap ada seluas 3000 hektar, kemudian anggaran hortikultura ini saya sebagai Sekjen juga sudah mencermati mengikuti kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat minggu lalu. Ini memang untuk sarana dan prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura ini memang hasil Rapat Dengar Pendapat untuk membantu pengelolaan pasca panen. Jadi pasca panen hortikultura waktu itu arahnya untuk menambah beli alat pengering, alat olah pasca, packaging, alat penyimpanan dan lain-lain. Jadi ke sarana dan prasarana pasca panen.

Selanjutnya Bapak Dedi, terkait dengan daya beli dan penggilingan, *Insyah Allah* kita penuhi. Tetapi secara umum yang sudah ditetapkan untuk Dapil praktis dipenuhi, kecuali memang untuk PSP ada, kalau menurut PSP kalau pun turun sekitar 10%, tapi kalau Eselon lainnya *Insyah Allah* sudah bisa diamankan Bapak Ketua.

Itu point-point yang bisa saya jawab, mohon ijin kalau ada yang belum dijawab.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya Pak Hasan silakan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NASDEM (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):**

Saya mengangkat dan mengingat kembali bahwa ayam itu dulu saat kita sepakat akan dihapus usulan Bapak Mindo Sianipar untuk diadakan walau karena ini menyangkut usulan Bapak Mindo Sianipar ini melihat bahwa usaha ayam itu adalah usaha rakyat kecil. Dan perlu menjadi catatan pengadaannya oleh masyarakat itu sendiri, karena tidak mungkin ayam kampung di Lampung dipelihara oleh orang Kabupaten Probolinggo karena struktur tanah dan cuacanya tidak sama. Barangkali itu untuk mengingatkan catatan saya selaku Pimpinan Komisi. Sekali lagi itu usulan Bapak Mindo Sianipar.

Terima kasih Bapak Ketua.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Ketua, interupsi Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Terima kasih.

Jadi saya ingin bertajam kembali sebagaimana yang telah disampaikan oleh 4 Kepala Dinas kepada saya terhadap pupuk jagung. Kalau ini dihilangkan saya kira jagungnya juga tidak bisa kita harapkan sepenuhnya untuk masyarakat. Oleh karena itu, saya meminta supaya bisa dialokasikan kembali untuk pupuk cair jagung ini di 4 kabupaten di Sulawesi Barat.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Suhardi Duka, itu ada bantuan juga pupuk cair subsidi. Jadi itu tidak dihilangkan yang sudah kita anggap selesai sudah.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Apa namanya Ketua, yang penting pupuk, pupuk itu harus masuk. Jangan terlalu tegang Pak Ketua.

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):**

Pak Ketua, dua menit.

**KETUA RAPAT:**

Lucu saja gitu, kemarin-kemarin kok tidak ada tiba-tiba ada yang ngotot gitu. Saya tertawa gembira mendengarnya saya. Jadi Bapak dan Ibu, dari dialog dan diskusi saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI. Bapak Menteri, terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan.

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):**

Pak Ketua, saya tadi tidak kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, Mbak Luluk mau ngomong apa.

Silakan.

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):**

Boleh ya.

**KETUA RAPAT:**

Boleh, apa sih yang untuk Mbak Luluk tidak boleh.

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Bapak Menteri, semua sehat.

Tadi terputus Bapak Menteri, tidak enak kalau putus.

Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa jangan menunggu FAO Pak Menteri yang ngasih peringatan baru kemudian kita melakukan langkah-langkah yang sangat serius karena di Komisi IV DPR RI ini sebenarnya jauh-jauh hari sudah mengingatkan itu bahkan sejak pertama kali kita bertemu di Rapat Kerja dulu sebelum COVID pun kita juga sudah mengingatkan. Setidaknya yang kita ingatkan adalah bukan hanya sekedar ketersediaan pangan itu memang harus ada tetapi juga kedaulatan. Disinilah momentum itu punya arti, di saat semua negara-negara juga sudah pasang pintu ditutup rapat-rapat untuk ekspor pangan termasuk Vietnam saja sudah ada kebijakan untuk tidak ekspor berasa maka sebenarnya ketahanan kita sebagai sebuah bangsa itu diuji.

Yang kedua, saya masih ingat juga apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa COVID ini seharusnya menjadi momentum kita semuanya untuk bisa mereformasi seluruh kebijakan yang terkait dengan pangan kita. Nah, yang kita harapkan adalah Pak Menteri ini pimpinlah yang namanya kebijakan ini. Kasihlah guiden rakyat ini harus seperti apa di tengah masalah COVID ini yang terkait dengan minimal mengamankan pangannya untuk

keluarganya sendiri. Saya berharap bahwa Bapak Menteri mulai hari ini menggerakkan apa yang mungkin kita sebut ayo menanam atau apapun di semua lahan-lahan yang tersisa atau bahkan tidak punya lahan sekalipun itu juga bisa dilakukan gerakan menanam.

Sekarang inisiatif solidaritas sosial, gerakan sosial juga tumbuh meskipun Pemerintah tidak melakukan kampanye tentang itu. Nah, saya berharap ini masuk di dalam skema anggaran. Saya hanya ingin misalnya begini, siapa pun orang keluarga-keluarga yang mau menanam tanaman horti yang bisa tumbuh cepat maka Pemerintah menyediakan benihnya.

**KETUA RAPAT:**

Mbak Luluk bisa singkat sedikit, karena sudah jam 16.00 WIB lewat. Mbak Luluk cukup masalah benih hortikultura....

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):**

Yang sudah dipangkas dan tidak diberikan akses untuk bisa mendapatkan benih.

**KETUA RAPAT:**

Mbak Luluk cukup?

**F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):**

Sebentar, setengah menit, tambahan setengah menit, karena tadikan putus, salah sendiri diputus.

Yang terakhir ini ada teman-teman dari Nahdatul Ulama di Jawa Tengah Pak Menteri. Saya kira ini bagus sekali kalau ini bisa menjadi model gerakan sosial, dimana kalangan agamawan juga sudah mulai menyerukan agar ada gerakan tanam bagi seluruh umatnya. Saya kira ini bukan hanya untuk Muslim tetapi semua bisa diajak dan Pak Menteri yang bisa menggerakkan itu semuanya. Semua agama saja karena apa? Krisis ini tidak hanya berhenti sebulan, dua bulan, seperti Bapak tadi bilang bahwa kesehatan mungkin selesai hanya dengan dua, tiga bulan, tetapi pangan akan panjang sekali. Jadi kita mendukung semua semangatnya Bapak Menteri tetapi jangan ditinggalkan Komisi IV DPR RI ya Pak, termasuk saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Dari dialog, diskusi, saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI, sebelum acara ini kami akhiri kami bacakan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian mengenai Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Anggota?

Bapak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

2. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian bersepakat untuk memprioritaskan program bantuan pangan dan bantuan sarana produksi kepada petani serta Padat Karya untuk mengantisipasi dampak COVID-19. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar memulihkan kegiatan prioritas yang relevan dengan situasi pandemi COVID-19, yaitu: bantuan alat mesin pertanian prapanen dan pascapanen; Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO); pengembangan kawasan Padi dan Jagung; pengembangan perbenihan (perkebunan dan hortikultura); pengembangan sayuran keluarga/Pekarangan Pangan Lestari; dan pengembangan ternak ruminansia kecil dan besar.

Anggota?

Pak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian bersepakat agar refocusing kegiatan dalam rangka COVID-19 dilakukan diantaranya dengan mengurangi komponen biaya dukungan manajemen, biaya operasional kantor, rapat-rapat, dan perjalanan dinas/luar negeri, mengingat situasi PSBB dan sisa efektif waktu anggaran tinggal 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar program

yang sudah disepakati tidak dilaksanakan untuk tidak dialokasikan kembali.

Anggota?

Bapak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju Bapak.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

4. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian bersepakat untuk mengintegrasikan program yang bersifat padat karya agar jangkauan wilayah program lebih luas dan lebih masif, dengan tetap mencakup wilayah irigasi, tadah hujan/lahan kering, lebak dan pasang surut, serta area banjir/kekeringan sebagaimana direncanakan.

Anggota?

Bapak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju Bapak.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam pendistribusian/pembagian Bantuan Pangan, Bantuan Benih, Bantuan Alat dan Mesin, Bantuan Padat Karya, dan bantuan lain dilakukan secara adil, merata, transparan, akuntabel, serta dapat menjangkau petani di wilayah daerah pemilihan sesuai prosedur aturan yang berlaku.

Anggota?

Bapak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

6. Komisi IV DPR RI menetapkan pagu anggaran pembangunan pertanian pada setiap Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2020, sebagai berikut:
- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.693.574.424.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp105.328.596.000,00 (seratus lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp3.719.143.498.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp574.146.411.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
  - e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp862.670.698.000,00 (delapan ratus enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.153.013.024.000,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar tiga belas juta dua puluh empat ribu rupiah);
  - g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp2.578.440.445.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - h) Badan Penelitian dan Pengembangan, sebesar Rp1.022.899.622.000,00 (satu triliun dua puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), sebesar Rp1.027.343.793.000,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - j) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp475.903.216.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah); dan
  - k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp837.322.087.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Anggota?

Pak Menteri?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Mohon ijin, bisa interupsi Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Momon.

Kalau Bapak Momon interupsi membatalkan Rapat Dengar Pendapat yang lain.

Silakan.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Kemarin sudah saya jelaskan pada saat Rapat Dengar Pendapat bahwa Irjen pun untuk sejak Maret, April, perjalanan juga tidak dilakukan. Kalau ditambah apa tidak sayang Pak, kalau memang ingin memberikan perhatian khusus Irjen minimal anggarannya tetap, tapi penambahannya ini cukup besar Rp30 miliar, sedangkan kegiatannya sekarang lebih banyak menggunakan... ini masukan saja tapi saya minta. Artinya, dalam kondisi seperti semua perjalanan, pertemuan dan sebagainya paradigmanya tidak seperti dulu lagi, termasuk Inspektorat Jenderal. Kalau ingin mendukung Itjen saya setuju tapi tidak perlu ditambah tidak dikurangi.

Kemudian yang kedua, saya memang kebetulan pernah jadi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Bapak Ketua. Tadi yang tidak bisa dipotong tadi yang saya sebutkan lebih dari Rp700 miliar realisasi yang ada sampai April karena ada mahasiswa uang makan tidak boleh dikurangi. Nah, ini mohon pertimbangan Bapak Ketua, BPSDMP, Litbang tidak langsung turun.

**KETUA RAPAT:**

Atau gini Pak Sekjen, kita kembalikan ke hasil Rapat Dengar Pendapat saja, bagaimana? Kita kembalikan ke hasil Rapat Dengar Pendapat yang sudah kita sepakati bersama, kita sudah tandatangani bersama. Kalau tadi bicara masalah Irjen katanya ada penambahan karena saya khawatirkan Inspektorat Jenderal kalau terlalu kecil pada akhir nanti pemeriksaan dananya tidak cukup. Tapi kalau bilang tadi dikurangi kembalikan kesemula saya setuju, tapi kalau yang lain ini mau diubah-ubah lagi ya kita kembali kepada hasil Rapat Dengar Pendapat saja. Kan begitu paling gampang kan. Silakan pilih yang mana, Bapak Sekjen sudah tandatangan, saya juga sudah tandatangan dan ini sudah saya laporkan juga kepada fraksi saya, kepada Pimpinan, kepada BPK sudah saya laporkan. Itu saja silakan. Kalau mau bicara Inspektorat Jenderal mau dibalikan ya balikin, pindahin kemana tinggal ngomong, itu saja.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Pertama, barangkali Inspektorat Jenderal kembalikan ke 79.581.831.

**KETUA RAPAT:**

Kembalikan Inspektorat Jenderal ke awal.

Bagaimana Kanjeng.

**F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Jadi begini Bapak Menteri, saya kan pernah juga ini Inspektorat itukan ujung tombaknya Kementerian, pengawas internal. Kalau pengawas internal jebol masuk ke BPK, itu dalam 2 bulan itu akan lepas kalau tidak ke Polisi, Jaksa, KPK. Saya ingin lebih baik kita di dalamnya betul-betul teliti, seperti tadi saya katakan mengenai standar anggaran. Saya sebenarnya kalau rinci banyak sekali, cuman tadi karena kita tidak mau merinci sampai jauh itu tugasnya Irjen itu. Tapi semuanya kembali kepada Bapak Menteri, kalau Bapak Menteri setuju dikurangi kalau perlu dihapus Irjen tidak apa-apa.

**MENTERI PERTANIAN:**

Bapak Ketua, ijin.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**MENTERI PERTANIAN:**

Saya kan monitornya dari Rapat Dengar Pendapat, kayaknya Rapat Dengar Pendapat yang sudah kemarin sudah terlaksanakan dari kuorum kemudian ada komitmen-komitmen seperti. Saya kira angka itu saja yang kita pakai, sehingga kita tidak berorientasi lagi gitu Pak. Mohon maaf, mungkin itu pemikiran saya karena menurut saya yang kemarin melalui Rapat Dengar Pendapat itu sudah ada orientasi yang kita sepakati. Jadi seperti itu Ketua.

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN:**

Ijin Bapak Ketua, dari Badan Karantina Bapak Ketua.

Mencermati kemarin Pak, yang waktu kita Rapat Dengar Pendapat itukan diusulkan Rp150 miliar pemotongan. Kami sudah menghitung dengan realisasi anggaran kita Bapak Ketua, itukan sudah disesuaikan kemarin dari 930 itu sisanya 479 dari realisasi. Nah, terhadap itu kita punya dana PNBPN, jadi tidak semua Rupiah Murni di Karantina Pak Ketua. Rp73 miliar itu anggaran PNBPN, kalau ini ditambah PNBPN kalau bisa digunakan Pak Ketua, kalau tidak dapat PNBPN maka ini tidak digunakan.

Nah, posisi anggaran di Karantina itu setelah kita kurangi PNBK sekitar Rp52 miliar. Semua belanja modal itu sudah kita pangkas semua Pak Ketua, jadi kami mohon kalau itu nanti 813 keputusan untuk karantina Bapak Ketua, pasti .... Karena ada PNBK 73 Pak Ketua. Nah, itu kami mohon pertimbangan Pak Ketua, untuk yang kita di Karantina.

Terima kasih Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ada lagi?

**KEPALA BADAN PENYULUH DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN:**

Mohon ijin menambahkan Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN:**

Maaf untuk Badan SDM Pak Ketua, ini kami sudah hitung-hitung, kalau yang kami sebut sebagai ... cost, jadi ... cost itu terdiri dari gaji, kemudian PHLN ternyata memang PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) tidak bisa dipotong Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Kepala Badan, anda lihat angkanya yang bisa dipotong antara lain dukungan manajemen. Kemudian belanja modal situasi COVID, pengadaan sarana kantor kan bisa ditunda. Jadi begini saja, kita tidak usah debat lagi. Tadi Bapak Menteri bilang kita kembalikan ke awal saja sesuai Rapat Dengar Pendapat. Kalau sesuai Rapat Dengar Pendapat maka pengurangannya lebih dasyat daripada yang kita tampilkan ini. Ini saya ambil jalan tengah, paham Bapak-bapak. Bapak-bapak sudah setuju, Bapak Sekjen sudah tandatangan, kalau tadi bilang mau dikembalikan ke awal saya kembalikan ke awal sudah. Jadi kalau kembalikan ke awal tidak usah tadi ada kita panjang lebar, saya tampilkan setuju tidak setuju saya ketok, sudah begitu.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN:**

Mohon ijin Bapak Ketua, jadi ini hanya ingin menyampaikan implikasi dari keputusan ini. intinya ada kurang lebih 600 mahasiswa dan siswa kita itu drop out kalau ini dilaksanakan, karena kami sudah tidak punya lagi anggaran untuk pembelajaran, itu Bapak Ketua. Kalau bangsanya pelatihan distop tidak apa-apa.

**KETUA RAPAT:**

Tadi Bapak Kepala Badan dengar tidak saya ngomong, yang dipotong itu antara dukungan manajemen.

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:**

Ijin Ketua, Badan Litbang. Jadi mohon ijin Bapak Ketua, Badan Litbang Kementerian Pertanian kita tiap tahun itu memproduksi benih sumber untuk kebutuhan seluruh Indonesia untuk padi, ada beberapa komoditi yang lain. Beberapa kegiatan penelitian kita ini sifatnya tahunan, jadi tidak bisa langsung diberhentikan, karena kalau kita mengulang itu bertahun-tahun kita sudah laksanakan .... Kita ulang berapa tahun lagi. Dan hampir semua kegiatan peneliti sudah jalan 30% Pak Ketua. Dan kalau dipotong seperti ini, ini bisa minus Pak Ketua. Mungkin itu sebagai tambahan saja Bapak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya cuma ingatkan uang makan mahasiswa itu bisa diambil dari biaya operasional yang lain. Coba nanti Bapak Sekjen anda lihat yang benar, pagu Setjen diluar gaji, tunjangan itu ada Rp540 miliar. Itu hanya di Ragunan, sedangkan Hortikultura Rp580 miliar wilayahnya di beberapa provinsi. Jadi kalau ginikan percuma kita Rapat Dengar Pendapat kemarin. Coba bagaimana maunya, saya ikutin.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, mohon ijin Bapak Ketua.

Setjen saya tidak membahas, saya setuju saja.

**KETUA RAPAT:**

Gimana gak bahas Bapak Momon, orang Rp540 miliar biaya operasionalnya. Kalau Bapak masih bilang kurang itukan tidak logika, yang lain juga sama kok bisa dipotong.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Ya, saya tidak mempermasalahkan Setjen bukan. Tapi BPSDMP, Litbang sama Karantina mohon ijin Bapak Ketua. Hanya memang mohon ijin Bapak Ketua, pertama ada beberapa Eselon I yang memang waktu tambahannya konsentrasikan ke TP dan PSP, tapi ini Horti dan BUN menurut saya tidak perlu ditambah bisa dilarikan ke SDM atau Litbang atau Karantina. Kalau pun kita bahas itu ke TP maupun PSP dalam rangka mendukung. Barangkali demikian Bapak Ketua, sekali lagi mohon maaf.

**MENTERI PERTANIAN:**

Ijin Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan.

**MENTERI PERTANIAN:**

Pada prinsipnya kita sih ikut sama Komisi IV DPR RI, artinya yang menjadi harapan dan kebutuhan yang ada. Hanya memang ada beberapa yang menjadi operasional pasti, dalam istilah Pemerintahan yang memang tidak boleh tidak ada Bapak, antara lain didalamnya gaji, honor, uang makan, kurang lebih seperti itu, yang lain silakan Bapak potong. Dan kalau memang itu belanja pasti termasuk utang yang harus diselesaikan, maka kami mohon sedikit dapat relaksasi atau keringanan untuk Bapak bisa memahami hal-hal seperti ini.

Saya kira itu Pak, usul kami.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Menteri, saya cuman menyampaikan kami sudah menghitung sangat teliti sekali, tidak mungkin ada pagu yang minus hanya untuk makan. Jadi Bapak Menteri, jangan mau juga terlalu mendengarkan Kepala Badan dan Litbang, itu saja ini saran saya. Ini kita, saya ini pendukung Bapak Menteri, karena Bapak Menteri begitu sukses. Saya punya kebanggaan bahwa mitra Komisi IV DPR RI Bapak Menteri Pertanian sukses, berarti Ketua Komisinya agak bener, itu saja.

**MENTERI PERTANIAN:**

Iya, jadi kita cuman relaksasi saja, kalau memang kita teliti kalau memang makan itu menjadi sebuah kemutlakan saya kira good and good kita coba lihat nanti. Karena saya juga lihat memang mahasiswa kita cukup besar di beberapa provinsi yang ada, minta maaf.

**KETUA RAPAT:**

Ya, kita kan ini diskusi Bapak Menteri. Kalau saya tadi ngotot dari awal kesimpulan yang saya buat itu hasil Rapat Dengar Pendapat, cuman setelah kami ulang lagi agar ada keseimbangan maka dari Komisi IV DPR RI mengalah. Kalau kami mau ngotot ya tadi saja yang hasil Rapat Dengar Pendapat kami masukin kesimpulan rapat kan selesai urusanya, saya sudah bisa pulang. Atau Bapak Menteri mau skors dulu 5 menit Pak Menteri, Bapak Menteri mau skors 5 menit untuk diskusi.

**MENTERI PERTANIAN:**

Bisa Ketua, tapi kita apakah nanti kalau misalnya besok itu ada kita katakan berhasil meminta dana tambahan dari Presiden dan kemudian disetujui, bolehkah kita kemudian menyisihkan hal-hal yang dipotong ini untuk kita pulihkan atau kita bicarakan kembali.

**KETUA RAPAT:**

Saya dukung apa maunya Bapak Menteri dan saya juga nanti malam berdoa supaya dapat tambahan besok dalam Ratas dengan Presiden Bapak Menteri.

**MENTERI PERTANIAN:**

Karena saya yakin teman-teman Eselon I ini tidak juga bermain-main mengusulkan anggaran yang ada, kita sudah sepakat. Tapi memang hal-hal yang mutlak yang tidak bisa harus ada termasuk makan apapun istilahnya Pak, dari 6000 mahasiswa itu harus tetap menjadi perhatian kita. Honor penyuluh itu tidak bisa berhenti sama sekali. Kalau cuman pelatihan saja kita tunda dan lain-lain bisa. Kalau berkenan apa mungkin kami skors dulu.

**KETUA RAPAT:**

Iya, ini ada satu alternative yang inspektorat Jenderal kami kembalikan kepada angka semula, berapa semulanya? Rp79 miliar, silakan dimasukkan dislot dimana. Kita skors 5 menit supaya bisa diskusi dengan baik, tapi satu hal saya menjamin Bapak Menteri ini direkam loh omongan saya untuk uang makan tidak mungkin bisa sampai ke kurangan makan. Belanja tetap itu tidak kita ganggu termasuk juga gaji dan lain-lain. Saya skors 5 menit ya Bapak Menteri, skors 5 menit.

**(RAPAT DISKORS 5 MENIT)**

**(SKORS DICABUT)**

Pak Sekjen silakan.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Kami sudah berembuk memang yang menjadi perhatian tetap bagaimana BPSDMP, Balitbangtan dan juga Badan Karantina ini organisasinya tetap berjalan. Tadi dari diskusi kami teman-teman kalau misalnya dikembalikan Rp50 miliar BPSDMP ditambah 50, Balitbangtan ditambah 50, dan Badan Karantina Pertanian 50 itu diambilnya pertama dari Itjen, mohon ijin Bapak Ketua dari Inspektorat Jenderal dikembalikan ini nanti dapat Rp25 miliar. Kemudian Ditjen Horti juga dikembalikan ini dapat Rp18 miliar, BUN dikembalikan dapat 50, nanti kekurangannya dari TP dan PSP tapi dengan catatan ... Dapil 100% sesuai dengan komitmen awal. Dan hasil refocusing ditujukan untuk sesuai dengan arahan Bapak Ketua, benih, padat

karya. Ini usulan kami berembug Bapak Ketua, sekali lagi mohon maaf khusus untuk 3 Eselon I memang perlu ada sedikit tambahan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Momon, saya jelaskan disini coba nanti suruh tadi yang Kepala Badan SDM. Penyelenggaraan pendidikan vokasi ini yang penting dipotong saya setuju. Jadi jangan bawa-bawa masalah uang makan mahasiswa, ini tidak kecukupan, saya jamin cukup, omongan saya direkam. Jadi kalau tadi Bapak Momon bicara 50, 50, 50 dikembalikan lagi, hortikultura dikembalikan lagi saya yang minta kemarin atas usulan teman-teman. Hortikultura itu ada tambahan untuk beli benih yang bisa ditanam oleh rakyat, karena COVID-19 inikan tidak tahu sampai kapan, bisa bulan Juli, bisa bulan Juni. Nah, tapi kan rakyat harus tetap makan.

Jadi kalau Bapak Momon tadi bilang masalah SDM tadi bilang uang makan tidak ada, itu bohong saya sudah sangat teliti sekali ini ngitung Pak. Yang Bapak Momon kemarin juga mengatakan bisa-bisa Kesekjenan tidak jalan kalau dipotong, hari ini Bapak Momon ngomongnya beda lagi. Coba deh, coba Bapak Momon resapin apa yang ngomong kemarin dan apa yang sekarang omong.

Saya Bapak Sekjen, Bapak Menteri, tidak punya kepentingan apa-apa, kepentingan saya cuman satu jangan sampai produksi pangan kita turun, itu saja yang lain tidak ada lagi saya. Ini loh, ini kita masih lihat masih ada perjalanan keluar negeri, Kepala Badan Karantina keluar negeri, promosi kopi. Saya agak bingung ini, Tupoksinya apa iya, apa tidak, saya mungkin satu-satunya Anggota Komisi IV DPR RI ini mungkin yang saya tahu, setiap keluar negeri pasti saya bawa kopi Lampung, saya promosikan. Saya kasih kedutaan, saya kasih parlemen, saya kasih Pemerintah yang saya kunjungi itu dengan uang saya pribadi. Tadi kalau Bapak Momon minta tambah lagi 50, 50, 50 dari mana lagi Pak, berarti nanti tidak ada pengadaan dryer mini untuk petani. Jadi kalau musim hujan petani tidak bisa jual, ditumpuk, busuk, gimana coba jalan keluarnya Bapak Momon atau kita kembalikan seperti hasil Rapat Dengar Pendapat saja. Kalau misalnya tadi okelah, nanti saya minta kesepakatan teman-teman di group misalnya, yang dari mana potong 25, 25, 25 balikin kesitu, tadikan dari Irjen sudah ada potongan Rp30 miliar ya, 30 brapa?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Dari Irjen dapat Rp25 miliar Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Iya, itukan 25 tinggal dimasukkan kemana, tadikan Bapak Sekjen ngusulin SDM sama Karantina, sama satu Balitbang, kan 3 kan yang jadi

focus Bapak Sekjen tadikan bicara 3. Yang 25 ini dari Inspektorat kita kembalikan kemana?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Kalau hanya 25 ....

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Ijin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Mbak Alien.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Pak Sekjen inikan kita memiliki Pagu usulan dari Eselon I bahan Rapat Kerja. Disinikan dari 11 Eselon I ada Pagu anggaran yang hasil dari keputusan Komisi IV DPR RI itu mengambil jalan tengah bahkan ada beberapa Eselon yang ditambahkan diluar dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Seperti misalkan di Irjen, di Irjen itu ada Rp79 miliar dinaikkan sampai Rp105 miliar. Terus di Dirjen BUN permintaannya 812 dari Eselon I, Komisi IV DPR RI memberikan Rp862 miliar. Ini ada yang lebih daripada yang tadi disampaikan sama Bapak Sekjen. Tolong dilihat dulu angka-angka semuanya terus di-compare dengan hasil pagu Eselon I yang diusulkan kepada Komisi IV DPR RI, biar di-compare dulu biar jangan jadi kebingungan.

Yang jelas disini kita melihat bahwa tidak terlalu besar juga pengurangan-pengurangan yang diusulkan oleh Eselon I dan juga yang disepakati dengan Komisi IV DPR RI. Mohon dengan sangat melihat dulu angka-angka tersebut dan di-compare dulu dan kita berbicara bisa mengambil kesimpulan. Kalau tidak hari ini kita belum bisa dapat hasilnya sampai juga Magrib ini sudah mau Magrib tidak ada hasil. Jadi tolong dilihat compare yang diajukan kepada Komisi IV DPR RI sesuai dengan yang sudah difocusing, yang sudah diralat oleh per Eselon I dan juga yang sudah ditawarkan oleh Komisi IV DPR RI.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya punya waktu masih 10 menit. Kalau memang tidak ada kesempatan kita kembali kepada Rapat Dengar Pendapat saja. Tolong disiapkan untuk bahan Rapat Dengar Pendapat tampilkan, kita buat keputusan rapat itu saja atau gimana Pak Sekjen.

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Kalau kembali kepada Rapat Dengar Pendapat pemotongannya lebih besar lagi ini.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Sekjen?

**F-PG (ALIEN MUS, S.H.):**

Pemotongannya lebih besar lagi Bapak Sekjen, Bapak Menteri.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Kami berasumsi bahwa pada saat Rapat Dengar Pendapat memang ada pengurangan dari 4 Eselon I, Sekjen, Badan Karantina, SDM dan Litbang. Tapi yang saya cermati saat itu memang focus untuk menambah Dirjen TP, dan Dirjen PSP. Terutama karena untuk memenuhi kebutuhan Alsintan. Sedangkan tadinya kami berasumsi Irjen, Horti dan BUN, memang diskusi kami saat itupun tidak punya pemikiran untuk nambah, tapi ya kembali lagi saya sekali lagi mohon maaf untuk SDM, kemudian Karantina dan Litbang ini karena tadi dijelaskan UPT-nya yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ketua, saya tidak punya kepentingan hanya saya pernah di SDM saya paham betul proses pembelajaran itu ada bahan praktek, ada apa, ini yang namanya. Menurut kami itu kalau diijinkan jalan tengah yang penting ada tambahan, juga Badan Karantina keberatannya PNBK kan belum pasti.

**KETUA RAPAT:**

Pak Sekjen, inikan di media Badan Karantina selalu bicara peningkatan ekspor sekian ratus persen, berarti ada PNBK dong. Coba lihat di media ada tidak kata-kata itu selalu, kalau mau bicara begitu. Dan juga ada satu program yang saya tidak habis pikir tanyakan Dirjen Tanaman Pangan, ada angka Rp32 miliar ubi kayu dan porang. Ubi kayu cuman Rp2 miliar, porangnya Rp30 miliar, belinya dimana, bibit porang belinya dimana. Saya ini sudah 6 bulan pesen sampai hari ini tidak ada untuk saya bagikan ke Dapil saya. Dan seberapa pentingnya porang itu Rp30 miliar, ini salah satu contohnya, cuman kan saya tidak mau bedah sampai kedetailnya. Coba tanya Dirjen Tanaman Pangan itu, ada tidak dia, disembunyikan porang Rp30 miliar, ubi kayu Rp2 miliar. Tetapi yang ditampilkan ubi jalar dengan porang, ubi kayu yang Rp10 miliar, mana penting porang sama ubi kayu. Kalau bicara diversifikasi pangan, coba tanyakan Rp32 miliar ubi jalar dan porang itu.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Pak Ketua, kalau boleh usul lagi sekali lagi. Untuk Horti dan BUN kalau bisa kembali seperti semula, sehingga alokasi 93 bisa didistribusikan ke

Eselon I Pak Ketua. Tapi kalau memang tidak bisa ya kelebihan Irjen untuk BPSDMP Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Jadi yang kembalikan ke SDM yang 25 sekian.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Kemudian kalau bisa Hortikultura Bapak Ketua dikembalikan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi Bapak Momon, saya 3 hari berapa hari memimpin Rapat Dengar Pendapat gunanya apa ini. Jujur saya sendiri takut Bapak Momon karena corona, mimpin rapat sendirian. Benar, saya juga manusia.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Pak Ketua, boleh ijin bicara Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak Hansi Lema.

Singkat karena waktunya mepet.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):**

Terima kasih.

Bapak Momon, kita sudah bicara dari hari Senin, Selasa, Rabu, sudah semua Pak, kami sudah baca detail anggarannya setiap Dirjen Pak. Kami sudah lihat persis Pak, mana yang harus kita kurangi Pak. Kalau kesimpulan saya Bapak mohon maaf, yang Bapak minta dikembalikan itu, itulah yang harusnya dikritisi Pak. Saya ini rijit melihatnya Pak, makanya tadi presentasi saya point per point Pak. Jadi mohon maaf Pak, ini saya ngomong ini saya merasa kami terhina secara nalar ini Pak. Senin, Selasa, Rabu kami sudah bicara Pak, panjang lebar dan sudah ada kesimpulan Pak. Tiba-tiba ini dibongkar lagi Pak, narasinya dibongkar, argumentasinya sepertinya dibolak-balik, mohon maaf dengan pendekatan Bapak yang sangat halus tetapi sebenarnya mengingkari semua Senin, Selasa, Rabu. Saya kecewa terus terang Pak.

Kalau point saya apresiasi karena memang menurut saya ada beberapa hal yang sudah benar terutama di PKH dan di PSP. Kalau yang Bapak minta dinaikkan lagi ini justru di point itulah yang saya banyak kritisi Pak.

Demikian Bapak Sudin, itu point saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Hansi Lema.

Bapak Sekjen, ini saran saya kenapa yang tidak Rp25 miliar itu mana yang lebih penting. Kalau bilang Karantina lebih penting ya kita pindahkan ke Karantina, kalau SDM lebih penting pindahkan ke SDM, itu saja. Tadikan Bapak Menteri sudah ngomong dengan saya besok sudah ada Ratas dengan Presiden, Insya Allah ada penambahan anggaran ya nanti diatur lagi. Bapak Menteri tadikan ngomong begitu, saya setuju, saya dukung Pak, kalau perlu Rp7 triliun balik lagi supaya saya tidak puyeng juga Pak. Karena saya menuntut Bapak peningkatan produksi sementara anggarannya dikurangi, ya saya juga puyeng Pak.

**MENTERI PERTANIAN:**

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Pada dasarnya kita ikut Pak, saya, Sekjen, Kepala Badan, Irjen sama Komisi IV DPR RI. Kita mau melihat sesuatu yang bermakna bagi kita semua dan negara. Hanya memang tadi itu kalau ada dinamika seperti itu saya kira bagus juga Pimpinan, karena kita tidak mau Badan SDM shutdown gitu, Balitbangtan shutdown tapi saya akan cek dengan kondisi yang ada seperti apa. Karantina itu kita bisa terima argumentasinya karena ada Penerimaan Negara Non Pajak disitu dimana hasilnya belum ada. Sekarang ini diperkirakan hanya 40%-50% dengan kondisi COVID yang ada.

Saya kira tujuan kita tetap sama seperti Bapak Hansi tadi menyampaikan, cuman memang fleksible juga kalau ada perkembangan-perkembangan nanti kita bisa ketemu untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang secara substansi dibutuhkan. Karena dengan kondisi yang tidak normal sekarang ini dengan COVID itu mencabik-cabik yang ada, mungkin ada rencana-rencana yang harus kita lakukan kemudian ada COVID.

Intinya Pimpinan Komisi IV DPR RI kami setuju Pak, cuman memang kami butuh juga sedikit perhatian agar 3 badan yang ada ini tidak shutdown atau tidak minus dalam menyelenggarakan kegiatannya. Walaupun saya akan coba kontrol juga, saya akan kembalikan Bapak Ketua atau ada hal-hal yang harus saya komunikasikan lagi yang menyangkut tiga badan ini.

Saya kembalikan Bapak Sekjen.

**KETUA RAPAT:**

Apa yang Rp25 miliar itu kita bagi tiga, 10, 10, 5 atau gimana. Saya juga kan prihatian juga dengan Karantina, saya yang paling ngotot, saya tegaskan saya yang paling ngotot memperjuangkan kenaikan anggaran Karantina, untuk apa? Untuk beli peralatan, untuk menjaga agar bahan

pangan yang masuk ke Indonesia aman. Saya juga megatakan berkali-kali di dalam Rapat Kerja dari jaman dulu Karantina ini sudah seperti dukun atau paranormal. Melihat yang lewat tidak melihat pun bisa tahu, saya prihatin, saya ke Bakauheni melihat sarana dan prasaranannya sangat minim. Saya lah yang paling ngotot tetapi dengan situasi begini kan kita harus saling mengerti.

Dari jaman Ibu Banun, “Ibu, adain alat Bu”, sampai dengan Bapak Ali Jamil “Bang, adain alat”, untuk apa? Jangan sampai kita cuman ngelongok di belakang Bea Cukai. Inikan saya yang minta, boleh tanyakan Bapak Sekjen sama Bapak Alii Jamil, saya tidak yang paling ngotot. Karena apa? Saya itu maunya Karantina itu garda terdepan. Dan kinerjanya Bapak Ali Jamil kan bagus, maka saya ngotot dinaikkan anggarannya, tapi kalau situasinya begini sudah dipotong Rp7 triliun bagaimana.

Jadi apa kita bagi tiga yang tadi Rp25 miliar sekian supaya ada rasa keadilan. Itu saja ini usulan saya.

**MENTERI PERTANIAN:**

Kita serahkan kepada Pimpinan saja. Silakan Pak, dibagi tiga juga oke, kita ikut saja.

**KETUA RAPAT:**

Jadi mau dibagi tiga atau SDM.

**MENTERI PERTANIAN:**

Bagi tiga.

**KETUA RAPAT:**

Bagi tiga.

Saya ulangi.

- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.693.574.424.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp79.581.831.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp3.719.143.498.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan belas miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp574.146.411.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp862.670.698.000,00 (delapan ratus enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.153.013.024.000,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar tiga belas juta dua puluh empat ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp2.578.440.445.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- h) Badan Penelitian dan Pengembangan, sebesar Rp1.031.481.877.000,00 (satu triliun tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), sebesar Rp1.035.926.048.000,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat puluh delapan ribu rupiah);
- j) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp475.903.216.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah); dan
- k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp845.904.342.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Anggota?

Bapak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Point B ada salah kalimat, boleh lihat sebentar.

**KETUA RAPAT:**

Point apa Bapak Sekjen?

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Point B, Rp79.581.831.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bukan seratus.

**KETUA RAPAT:**

Delapan ratus iya, maaf.

**SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:**

Terima kasih Bapak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

7. Komisi IV DPR RI meminta penyesuaian rincian volume dan anggaran per Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2020 agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat Jumat, 8 Mei 2020.

Anggota?

Bapak Menteri?

**MENTERI PERTANIAN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum menutup Rapat Kerja hari ini kami persilkan Menteri Pertanian untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini.

Silakan Bapak Menteri.

**MENTERI PERTANIAN:**

Pimpinan Komisi IV DPR RI dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang kami muliakan, kami hormati dan kami banggakan,

Bapak Sekjen dan segenap jajaran Eselon I,  
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

*Alhamdulillah* hari ini kita sudah selesai dengan Rapat Kerja. Terima kasih Ketua, saya ingin mengapresiasi bahwa apa yang ada di pikiran atau visi yang ada di Komisi IV DPR RI sebenarnya ada juga dari teman-teman

kami disini. Artinya, dari perjalanan tiga, empat kali Rapat Dengar Pendapat saya sangat meyakini bahwa kita memang mengarah kepada sebuah harapan yang sama agar besok pertanian itu ada artinya bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia.

Ketua, Insya Allah tidak ada ha-hal yang kami sembunyikan, tidak ada hal yang kita tidak transparan dan mari kita sama-sama. Saya juga sangat serius untuk ikut mengatakan bahwa Insya Allah kita kawal semuanya dengan sangat normative, proporsional seperti itu. Oleh karena itu, iijinkan saya dengan segala ya katakanlah ketulusan-ketulusan yang ada dalam empat kali dan lima kali Rapat Kerja anggaran kita refocusing dalam situasi yang sangat tidak normal saya kira banyak hal yang saya pelajari dan kelihatannya memang baik dari teman-teman Eselon I begitu serius untuk memperbaiki apa yang kurang kemarin. Kita saling percaya Pak Ketua, bahwa dengan bersama-sama kita mempunyai sesuatu yang baik.

Ke depan itu tantangan kita adalah COVID yang sudah berlangsung. Jujur saya ingin katakan saya lapor sama Presiden bahwa dampak dari COVID ini yang paling besar adalah pertanian. Saya punya hitungan di atas 30%, oleh karena itu setiap mengajukan anggaran 2,7 juta tadinya 2,4 juta petani miskin, petani menggarap, petani secara hutan, buruh tani itu harus mendapatkan santunan dengan BLT seperti BLT yang ada. Tadinya kita minta ke Mensos dan sudah dijanjikan ternyata gagal, kemudian didorong ke Menteri Desa juga seperti itu gagal. Oleh karena itu, saya maju sendiri ke Presiden dalam Ratas jujur sekaligus saya lapor dan mengemukakan pentingnya semangat itu dijaga. Dan di sana juga salah stau reasoning bahwa hasil panen yang melimpah luar biasa sekarang ini, yang Puso hampir saya tidak mendengar secara signifikan. Ada Puso tetapi tidak lebih dari 2%, kita sudah buang 4% Pak Ketua. Jadi seperti itu.

Oleh karena itu, kalau memang harga di sawah masih kurang dan ini bersama Presiden ini tentu ada hal-hal yang memang tidak biasa. Karena mestinya panen memang turun tetapi tidak dengan harga yang seperti ini. Di pasar harga naik tetapi di sawah kurang. Dan ini dalam tiga Ratas, tiga kali saya dikomplain seperti ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Oleh karena itu, besok saya masih berharap kawal Dapil. Dapilnya Bapak itu saya menyampaikan sama ada semua. Insya Allah kami ... di sana apa yang harus kami lakukan. Dan kami mau kita sama-sama bangga menjadi satu kesatuan yang mengurus pertanian di negara ini, Insya Allah. Saya sampai detik ini masih yakin hasil hitung-hitungan kita masih kuat, masih baik. Dan mudah-mudahan alam tetap berpihak kepada kita Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI, hingga kita harus jalan bersama-sama, distribusinya harus kita percepat. Termasuk yang tadi dilaporkan dari Aceh sampai Papua saya kira masih banyak yang harus kita lakukan bersama.

Kalau ada yang kurang, kalau ada yang tidak berkenan mungkin tinggal kita penyesuaian-penyesuaian kordinasi dan komunikasi saja Pak

Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI. Niat kami harus selalu bersama-sama. Saya kira itu, maaf kalau ada yang salah selama ini, ada yang kurang berkenan saya berharap bersama-sama bisa memahami situasi yang ada di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian adalah miliknya Komisi IV DPR RI dan Komisi IV DPR RI adalah tetap ... Kementerian Pertanian.

Terima kasih Ketua.

Selamat berpuasa, ridha Allah bersama kita.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Menteri, kalau bicara percaya saya sumpah demi Allah, demi Tuhan saya sangat percaya sama Bapak Menteri 100%, karena kalau tidak Bapak Menteri dari pagi capek, habis rapat dua kali, kemudian rapat lagi sama Komisi IV DPR RI, besok sudah ada Ratas lagi, kemudian Rabu ada rapat lagi saya paham Pak, saya sangat percaya sama Bapak. Saya tidak bicara yang lain, saya cuman sama Bapak Menteri saya percaya, hanya itu saja.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabil'amin*, Rapat Kerja kami tutup dan saya mengucapkan selamat berbuka puasa Bapak Menteri, minumlah minuman yang segar supaya tetap sehat. Jaga kesehatan Bapak Menteri.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.17 WIB)**

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat,

Ttd.

**Drs. Budi Kuntaryo**  
NIP. 196301221991031001